

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
PROVINSI PAPUA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD TAHIR

NIM. 500030964

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2015

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA

Muhammad Tahir
muhammادتahirut@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua; dan 2) Mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nduga. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus yaitu seluruh populasi dijadikan responden yakni sebanyak 40 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sistem pengendalian intern yang terdiri atas: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga; dan 2) Pengujian secara parsial menunjukkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas: kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, sedangkan variabel lingkungan pengendalian, dan penilaian risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah. Dari ketiga variabel bebas yang berpengaruh signifikan tersebut, ternyata variabel kegiatan pengendalian yang dominan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, rekomendasi penelitian adalah seyogyanya kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan perlu dipertimbangkan dalam sistem pengendalian intern, sedangkan lingkungan pengendalian, dan penilaian risiko masih perlu ditingkatkan secara maksimal agar dapat mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga di masa akan datang

Kata Kunci : Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, pemantauan, dan laporan keuangan.

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM TO GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS, NDUGA REGENCY PAPUA PROVINCE

Muhammad Tahir
muhammادتahirut@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The purpose of this study was to: (1) analyze the effect of the control environment, risk assessment, control activities, information, and monitoring of government financial statements Nduga Regency, Papua Province; and (2) Knowing the variables dominant influence on the government's financial statements Nduga Regency, Papua Province, This study is a descriptive study with a descriptive quantitative approach using primary and secondary data. Data collection techniques that documentation, and questionnaires. The population in this study were all employees of the Office of Financial and Asset Management (DPKAD) Nduga District. The sampling method used in this study is that the entire population census respondents that as many as 40 people.

The results showed that simultaneous internal control system comprising: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring significant effect on the financial statements of the District government Nduga. Testing partially showing the internal control system comprising: control activities, information and communication, and monitoring of significant and positive impact on the financial statements Nduga district government, while the variable control environment, risk assessment and not significant effect on the financial statements of the government. Of the three independent variables that have a significant effect, it appeared that the variables that control activities dominant influence on the government's financial statements Nduga district, recommendations research is should control activities, information and communication, and monitoring should be considered in the internal control system, while the control environment and risk assessment still needs to be increased to the maximum in order to support the quality of financial reports Nduga district government in the future.

Keywords: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring, and financial reporting.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MADAYA PROVINSI PAPUA
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Wamena, 13 Juni 2015

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

PAJAK PEMANGKIL BENCANA
2015

1A21AACF483417379

ENAM RIBU RUTIAH

6000



ai Rp. 6.000,0

DJP

Muhammad Tahir

NIM : 500030964

PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGSTER (TAPM)

Judul TAPM : **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua**

Penyusun TAPM : **Muhammad Tahir**

NIM : **500030964**

Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Hari/ Tanggal : **Sabtu, 13 Juni 2015**

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Usman Pakasi, M.Si
NIP. 196306181989031004

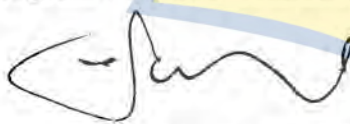
Pembimbing II



Dr. I.G.K. Agung Ulupui, M.Si
NIP. 196613121993032003

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pasca Sarjana



Suciati, M.Sc, Ph.D.
NIP. 19570213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN TAPM

Nama : MUHAMMAD TAHIR
 NIM : 500030964
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul TAPM : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA PROVINSI
 PAPUA

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
 Administrasi Publik Program Pasacasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu / 13 Juni 2015
 Waktu : 12.00 WIT

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Dr. Darmanto, M. Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003

Penguji Ahli
Dr. Darmanto, M. Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003

Pembimbing I
Dr. Usman Pakasi, M. Si
 NIP. 19630618 198903 1 004

Pembimbing II
Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M. Si
 NIP. 19661312 1993 03 2 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *alhamdulillah* senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya yang telah memberi kesehatan jasmani dan rokhani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Walaupun penulis mengalami berbagai hambatan akibat terbatasnya waktu dan kemampuan, namun berkat motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Terkhusus kepada Ibunda serta saudara-saudaraku atas doa tulusnya sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini tepat pada waktunya.
2. Suciati, M.Sc, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Dr. Darmanto, M. Ed. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
4. Kepada Tim Penguji yang telah banyak memberi kritik dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
5. Kepada Ketua UPBJJ Jayapura Bapak Dr. Sardjijo, M. Si yang telah memberikan saran dan bimbingan dari awal sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Kepada Dra. Suratni, M.Pd yang tak bosan – bosannya menerima keluh kesah dan permasalahan mahasiswa dari awal sampai penyelesaian studi ini;

7. Kepada Pembimbing I Dr. Usman Pakasi, M. Si. dan Pembimbing II Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M. Si. Yang tidak bosan – bosannya mengoreksi dan memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak/Ibu dosen pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
9. Teristimewa kepada Isteri tercinta Herni, SE yang senantiasa mendoakan dan mendampingi penulis dalam suka dan duka, serta anakku yang selalu memberikan kebahagiaan sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan Pendidikan (S2).
10. Allies Yembise, SE.,M.Si, selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga beserta staf yang telah bersedia menjadi informan dan data-data kepada penulis.
11. Drs. Sabrun Katili, selaku Inspektur Nduga yang telah memberikan support dalam penyelesaian studi;
12. Teman – teman mahasiswa seangkatan yang telah banyak membantu baik langsung maupun tidak langsung selama perkuliahan;
13. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan pada Program Pascasarjana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat berdoa semoga semua amal baiknya mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang membangun akan kami terima dengan senang hati. Akhir kata semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk menambah wacana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Amin.

Jayapura, Juni 2015
Penulis,

Muhammad Tabir

RIWAYAT HIDUP

- Nama : **MUHAMMAD TAHIR**
- NIM : 500030964
- Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
- Tempat/ Tanggal Lahir : Bulukumba / 16 Pebruari 1970
- Riwayat Pendidikan : Lulus SD 104 Jannaya pada Tahun 1983 di Desa Lembanna Kec. Kajang
 Lulus SMP Negeri Kalimporo di Kec. Kajang pada Tahun 1986
 Lulus SMA Negeri I Bulukumba pada Tahun 1989
 Lulus S1 Bahasa Asing (Bhs. Jerman) di IKIP Ujung Pandang pada Tahun 1994
 Lulus S1 Administrasi Negara pada STIA AI- YAPIS WAMENA Tahun 2008.
- Riwayat Pekerjaan : Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004 sebagai Guru Bahasa Asing Bahasa Jerman pada SMA Negeri I Tiom Kabupaten Jayawijaya.
 Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 sebagai Kepala Seksi Arsip Statis pada Kantor Arsip Kabupaten Jayawijaya.
 Tahun 2008 sampai dengan 2009 sebagai Kepala Seksi Pengawasan SMA/ SMK pada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayawijaya.
 Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 sebagai Inspektur Pembantu pada Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Nduga Propinsi Papua.
 Tahun 2012 sampai sekarang sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Nduga Propinsi Papua.

Jayapura, 13 Juni 2015

MUHAMMAD TAHIR

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	<i>i</i>
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	<i>iii</i>
LEMBAR PERSETUJUAN	<i>iv</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>v</i>
KATA PENGANTAR	<i>vi</i>
RIWAYAT HIDUP	<i>viii</i>
Daftar isi	<i>ix</i>
Daftar Bagan	<i>xiii</i>
Daftar Tabel	<i>xiv</i>
Lampiran	<i>xv</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	<i>1</i>
B. Perumusan Masalah	<i>11</i>
C. Tujuan Penelitian	<i>11</i>
D. Kegunaan Penelitian	<i>12</i>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	<i>14</i>
B. Penelitian Terdahulu	<i>49</i>
C. Kerangka Berpikir	<i>55</i>
D. Operasionalisasi Variabel	<i>59</i>
C. Hipotesis	<i>62</i>

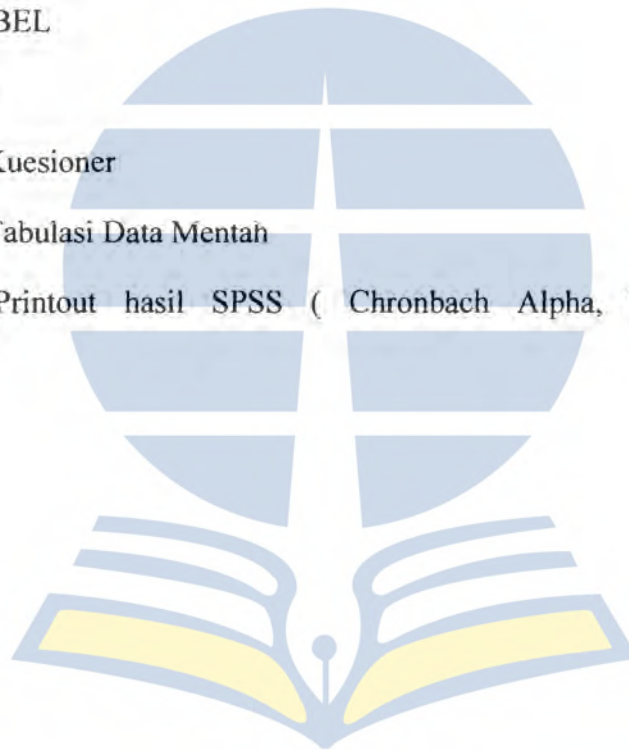
BAB III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	63
B. Populasi dan Sampel	64
C. Instrumen Penelitian	65
D. Prosedur Pengumpulan Data	66
E. Metode Analisis Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	72
1. Lokasi Penelitian	72
a. Karakteristik Responden	72
b. Jenis Kelamin	73
c. Tingkat Umur	73
d. Tingkat Pendidikan	74
2. Peraturan Perundang – Undangan yang Terkait Penelitian...	75
B. Hasil Penelitiann	77
1. Variabel Laporan Keuangan Pemerintahan (Y)	77
2. Variabel Lingkungan Pengendalian (X ₁)	79
3. Variabel Penilaian Risiko (X ₂)	80
4. Variabel Kegiatan Pengendalian (X ₃)	82
5. Variabel Informasi & Komunikasi (X ₄)	84
6. Variabel Pemantauan (X ₅).....	85
7.. Pengujian Instrumen Penelitian	87
a.. Uji Validitas.....	87
b Uji Reliabilitas	90
8. Pengujian Asumsi Klasik	94
a. Uji Normalitas	94
b. Uji Multikolinearitas	95
c. Uji Heterokedastisitas.....	96
9. Pengujian Hipotesis.....	97
a. Pengujian Hipotesis secara Parsial	98
b. Pengujian Hipotesis secara Simultan	101

C. Pembahasan	103
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR BAGAN	
DAFTAR TABEL	
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Kuesioner	
Lampiran 2 Tabulasi Data Mentah	
Lampiran...3...Printout hasil SPSS (Chronbach Alpha, Tabel Regresi,).	



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Analisis Penelitian Terdahulu	54
2.	Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.....	73
3.	Distribusi Responden menurut Tingkat Umur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.....	74
4.	Distribusi Responden menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.....	75
5.	Deskripsi Variabel Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nduga	78
6.	Deskripsi Variabel Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga	80
7.	Deskripsi Variabel Penilaian Risiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga	81
8.	Deskripsi Variabel Kegiatan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga	83
9.	Deskripsi Variabel Informasi/Komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga	84
10.	Deskripsi Variabel Pemantauan pada DPKAD Kab. Nduga.....	86
11.	Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.....	88
12.	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	91
13.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	95
14.	Pengujian Secara Serempak (Uji F)	101
15.	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R ²)	102
16.	Pengujian Secara Parsial (Uji-t)	102

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Angket Penelitian	120
2.	Tabulasi Data Hasil Kuesioner Penelitian.....	124
3.	Analisis Distribusi Karakteristik Responden.....	125
4.	Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian	126
5.	Hasil Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas	132
6.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menelusuri perjalanan sejarah pemerintahan bangsa Indonesia, di mana era reformasi sebagai era pengganti orde baru menggeliat sejumlah harapan agar tercipta keadaan yang lebih baik, terutama dalam aspek pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, praktik birokrasi yang efektif, efisien, disertai pelayanan masyarakat yang begitu cepat, tepat dan prima. Namun, harapan tersebut masih saja terpendam, sehingga masih diperlukan refleksi harapan lanjutan untuk menata dan memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan sesuai harapan reformasi. Meskipun demikian sejumlah langkah terpuji dalam pemenuhan harapan-harapan baru di era awal reformasi, memang telah menampakkan aksi, akan tetapi masih dalam tataran prosedural, belum pada tataran substantif dan aksi di lapangan. Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, tak dapat dielakkan pula adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju pemerintahan dengan sistem penerapan otonomi daerah.

Sehubungan dengan itu pula banyak anggapan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah telah berjalan secara demokratis, jujur, bersih dan bertanggung-jawab sesuai dengan amanat dan komitmen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pandangan tersebut masih sebatas pandangan luar yang melihat sepintas perjalanan sistem penerapan pemerintahan otonomi daerah. Apabila ditelusuri lebih jauh, maka dapat dinilai bahwa otonomi daerah masih berjalan di tempat, terlebih lagi mengenai Daerah Otonom Baru.

Di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi yang satu ada keberhasilan, tetapi di sisi lain terdapat pula kegagalan. Setelah melihat dan mengevaluasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan beberapa daerah otonom ternyata masih menunjukkan beberapa kegagalan. Hal tersebut terbukti diperkuat dengan berbagai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan predikat *disclaimer*, dalam arti bahwa banyak hal yang perlu dibenahi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk salah satunya adalah Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan pada berbagai aspek kewenangan di daerah khususnya pemerintah Kabupaten Nduga sebagai daerah otonom baru di Propinsi Papua yang menjadi objek penelitian ini.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk di Kabupaten Nduga.

Pemerintah Kabupaten Nduga sebagai pihak yang diberi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk

dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. " Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel " (Suprpto, 2006).

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik merupakan hal yang wajar dan harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini, di masa lalu pemerintah sangat dominan, dan menjadikan masyarakat sebagai pihak yang sangat diabaikan dalam setiap proses pembangunan. Peranan pemerintah yang dominan tersebut ternyata tidak menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas mulia untuk mensejahterakan rakyat karena yang terjadi adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat mengabaikan dan penyalahgunakan kepercayaan rakyat sehingga menyebabkan pelayanan publik tidak memuaskan masyarakat termasuk di Kabupaten Nduga.

"Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan, baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun pihak eksternal" (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai

PPKD/BUD. Laporan keuangan tersebut dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Komponen-komponen dari laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya karakteristik kualitatif yang diperlukan menurut Abdul Hafiz (2009:11), antara lain: "relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami". Oleh karena itu, keempat karakteristik laporan keuangan tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk variabel laporan keuangan pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan laporan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Nduga.

Reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *good governance* secara konsisten. Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah, di mana pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh unit-unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah, termasuk sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Nduga.

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diadopsi dari konsep internal control yang dikeluarkan COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasinya menggunakan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*), Pengendalian Intern (*Internal Control*) dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud Deterrence*). COSO memiliki prinsip dasar *good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations*" (Utoyo, 2011).

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Visi yang diembannya adalah “Menjadi Institusi yang Transparan, Akuntabel dan Profesional dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Selanjutnya misi organisasi ini yang diembannya adalah (1) Menyediakan Informasi pengelolaan keuangan daerah yang akurat, relevan dan tepat waktu; (2) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur; dan (3) Meningkatkan kompetensi dan integritas kinerja aparatur yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dalam mewujudkan visi dan misi yang diemban tersebut, tentu tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian intern di dalam mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah. Visi misi yang diemban tersebut diselaraskan dengan visi misi daerah dengan pelaksanaan program-program kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilaporkan dalam laporan keuangan yang handal dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaan program-program kegiatannya, masih terdapat penyerapan anggaran yang tidak sesuai target. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern pemerintah perlu dikaji untuk mengefektifkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Nduga. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK – RI selama tiga tahun berturut – turut Kabupaten Nduga masih memperoleh opini disclaimer. Menurut hasil penilaian tersebut lebih disebabkan pada lemahnya Sistem Pengendalian

Intern Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.

Sistem pengendalian intern dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah (disingkat SPIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah tersebut menjadi variabel independen (bebas) yang perlu dikaji dan diteliti agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nduga.

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi yang dapat mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian sebagai dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Sehubungan dengan fenomena yang terkait dengan lingkungan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga yakni: masih belum optimalnya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai ketentuan (indikator – indikator penilaian BPK – RI tentang SPIP) yang berlaku. Padahal lingkungan pengendalian sebagai *soft control* yang mendapatkan porsi terbesar dalam membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, komitmen dari para

pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang didukung dengan *hard control* yang baik.

Lingkungan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sesuai dengan konsep pengendalian menurut COSO (2013 : 4), meliputi: "(1) penegakan integritas & nilai etika; (2) pimpinan kondusif dalam mengatasi masalah; (3) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; dan (4) Penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai". Keempat unsur lingkungan pengendalian tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk lingkungan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, lingkungan pengendalian perlu dikaji agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nduga.

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Sehubungan dengan fenomena yang terkait dengan penilaian risiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga yakni: belum dilakukannya sistem pemetaan yang terdokumentasi dari sub unsur identifikasi dan analisa resiko yang telah dilakukan pemerintah setempat. Unsur-unsur penilaian risiko yang digunakan untuk mendesain pengendalian internal, antara lain: " (1) Keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah; (2) Kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan; (3) Penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan; dan (4) Penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan " (COSO : 2013 :4) . Keempat unsur penilaian risiko tersebut menjadi

indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk penilaian risiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, penilaian risiko perlu dikaji agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

"Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan" (COSO : 2013 : 5). Sehubungan dengan fenomena yang terkait dengan kegiatan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga yakni: dalam pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKAD Kabupaten Nduga. "Kegiatan pengendalian tersebut meliputi: (1) prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi; (2) pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi; (3) perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi; dan (4) Pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi " (COSO : 2013 : 5). Keempat unsur penilaian risiko tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk kegiatan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian perlu dikaji agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nduga.

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan pegawai melaksanakan tanggungjawabnya. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, meliputi: sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi

entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Selanjutnya komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan.

Sehubungan dengan fenomena yang terkait dengan informasi dan komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga yakni: informasi sebagai alat komunikasi efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi tergolong belum memadai terutama dalam menyampaikan laporan-laporan program/kegiatan yang menjadi bahan evaluasi perbaikan perencanaan selanjutnya, sehingga perlu adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan tersebut. " Informasi dan komunikasi tersebut, meliputi: 1) Organisasi menghasilkan informasi berkualitas; (2) Organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern; (3) Organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat; dan (4) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus " (COSO : 2013 : 5) . Keempat unsur informasi dan komunikasi tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk variabel informasi dan komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, informasi dan komunikasi perlu dikaji agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nduga.

Pemantauan pengendalian adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Sehubungan dengan fenomena yang terkait dengan pemantauan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga yakni: tindaklanjut rekomendasi monitoring masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya, padahal pemantauan dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya pemantauan pengendalian mencakup: " (1) Frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern; (2) Fungsi internal audit; (3) Saran dari akuntan; dan (4) Rekonsiliasi laporan secara periodik " (COSO : 2013 : 5). Keempat unsur tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk variabel pemantauan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, pemantauan perlu dikaji agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal tersebut sejalan pula dengan saran dan masukan dari BPK – RI setiap pemeriksaan bahwa perlunya komitmen dan perbaikan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mendapatkan opini yang lebih bagus terkait pengelolaan keuangan daerah.

Kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah tersebut mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi/komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Kelima unsur tersebut harus saling menguatkan, dan disesuaikan dengan bentuk organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan daerah, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul: *“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara parsial berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua ?
2. Apakah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua ?
3. Variabel penelitian manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan

- pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian secara parsial terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua.
2. Menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian secara simultan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua.
 3. Mengetahui variabel penelitian yang lebih berpengaruh dominan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah mendapatkan dan memperoleh tujuan penelitian secara keseluruhan, maka diharapkan penelitian memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Menambah bahan kajian/refrensi bagi peneliti berikutnya tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah agar kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah dapat diefektifkan di masa akan datang serta pentingnya pimpinan melaksanakan sistem pengendalian yang memadai.

2. Bagi pemerintah daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan instansi terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan laporan keuangan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

3. Bagi penulis

Diharapkan dapat mendalami kajian dan wawasan pengembangan khasanah ilmu administrasi pemerintahan khususnya sistem pengendalian intern pemerintah dan laporan keuangan pemerintah guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diharapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Administrasi Pemerintahan

Sejalan dengan terus bergulirnya perbaikan-perbaikan sistem pemerintahan era reformasi, pemerintah pusat mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. " Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (*public services*) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah. Hal ini akan menuntut peran baru eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel " (Devas, 2001).

Menurut Umar (2004), " administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperolehnya kembali baik sebagian maupun menyeluruh atau disebut juga tatausaha (*clerical work, office work*) ". Sedangkan administrasi dalam pengertian yang lebih luas adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana

mencapai tujuan yang telah dibentuk". Selanjutnya Wayong *dalam* Nawawi (2001:30), mendefinisikan "administrasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha (pemerintah) agar tujuan tercapai. Sedangkan pengertian administrasi menurut Nawawi" (2001: 28), adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau sistem kerja sama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama. Di sisi lain dikatakan bahwa administrasi merupakan ilmu yang terpakai dalam merangkai suatu harapan di dalam perencanaan dengan usaha berupa realisasi kegiatan sesuai perencanaan dan dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dibagi dalam dua fungsi administrasi dengan unsurnya masing-masing yaitu:

1. Fungsi primer, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan/bimbingan (*comanding*), koordinasi (*coordination*), kontrol/pengawasan (*control*), serta komunikasi (*communication*).
2. Fungsi sekunder, yaitu: tata usaha, keuangan, personalia, logistik (perbekalan) serta hubungan masyarakat (*humas*).

Unsur pertama disebut fungsi manajemen dalam administrasi (*administrative function of management*) dan kedua disebut fungsi operasional dalam manajemen (*operative function of management*).

Pengertian pemerintahan menurut Kansil (2004), " pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Selanjutnya pengertian pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah" .

"Administrasi pemerintahan daerah atau manajemen pemerintahan daerah yaitu aktivitas dan proses dalam mengelola sumber daya yang ada pada

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang berpegang pada azas efektivitas, efisiensi, equity dan ekonomi. Pada sisi lain administrasi pemerintahan daerah mempunyai dimensi sesuai dimensi utama administrasi negara yaitu: kebijakan publik, perilaku organisasi dan pengembangan organisasi" (Diharna, 2008).

a. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan politik pemerintah dalam sistem pemerintahan didasarkan pada kebijakan politik yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi presiden dan para menteri yang bersangkutan menetapkan kebijakan pemerintah dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dengan berpedoman pada UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR dan berbagai undang-undang yang berlaku termasuk kebijakan di daerah dalam bentuk Perda, Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Kepala Daerah.

b. Pelaksanaan tugas administrasi

Pelaksanaan tugas administrasi adalah merumuskan kebijakan pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan pelaksanaan/ operasional adalah para pejabat profesional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor menteri negara/departemen teknis/lembaga-lembaga pemerintah yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing (Umar, 2004).

Pelaksanaan tugas administrasi meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan/ pengendalian di bidang:

- 1) Struktur organisasi
- 2) Keuangan
- 3) Kepegawaian
- 4) Sarana/peralatan (Nawawi, 2001)

c. Penggunaan Dinamika Administrasi

Semua kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini peranan unsure dinamika administrasi adalah sangat besar yakni dalam rangka proses pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur dinamika penggerak administrasi ini meliputi:

- 1) Pimpinan
- 2) Koordinasi
- 3) Pengawasan
- 4) Komunikasi dan kondisi yang menunjang (Diharna, 2008).

Administrasi pemerintah di dalam penyelenggaraannya, menunjukkan ciri-ciri (Diharna, 2008) sebagai berikut:

- a. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah termasuk didalamnya badan-badan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya setiap tindakan pemerintah harus mempertimbangkan dua kepentingan yakni tujuan dan landasan hukumnya.
- b. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh badan yang berwenang. Dalam menjalankan kewenangannya administrasi pemerintah di Indonesia berdasarkan atas ketetapan-ketetapan MPR yang bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.

- c. Administrasi pemerintah dalam pengaturan organisasinya bersifat birokrasi. Birokrasi dalam arti yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan harus dilakukan oleh orang banyak. Di negara kita pengaturan organisasi pemerintah berdasarkan atas struktur birokrasi yang mengatur segala kegiatan pemerintah baik kedalam maupun keluar dan tata cara pengambilan keputusan yang kompleks.
- d. Administrasi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada prosedur kerja yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan misalnya peraturan perijinan, peraturan tentang pedagang kaki lima, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi. Administrasi pemerintah berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) fungsi/kegiatan dasar yaitu: perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas administrasi, dan penggunaan dinamika administrasi.

2. Konsep Sistem Pengendalian Intern

"Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian intern, maka tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Secara umum pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional organisasi tertentu" (Tunggal, 2005).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2001:319.2) yaitu: "Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga

golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2002: 216), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu; 1) Keandalan informasi keuangan, 2). Kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku, 3) Efektifitas dan efisiensi operasi.”

"Berbagai upaya dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya, di antaranya organisasi dituntut agar mampu mewujudkan strategi-strategi organisasi jangka panjang. Strategi-strategi jangka panjang akan diwujudkan dan diterjemahkan dalam serangkaian tindakan atau aktivitas organisasi yang menggambarkan kinerja organisasi dalam jangka panjang, namun kinerja yang dilihat hanya dari perspektif financial saja dirasa sudah tidak memadai lagi sehingga diperlukan suatu alat yang mengukur kinerja dari berbagai perspektif secara komprehensif" (Yuwono, dkk., 2008).

"Ukuran kinerja yang sudah ditetapkan oleh organisasi tentu saja membutuhkan suatu upaya untuk mewujudkannya, dalam hal ini salah satu upaya yang dapat diambil adalah dengan melakukan pengendalian intern yang memadai, dimana pengendalian intern merupakan alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi" (Hartadi, 2001).

Sehubungan dengan beberapa pengertian pengendalian intern di atas, maka terdapat beberapa konsep dasar dari pengendalian intern sebagai berikut:

- a. Pengendalian intern bukan merupakan suatu tujuan, melainkan suatu proses untuk pencapaian tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

- b. Pengendalian intern dijalankan oleh orang dan pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh dari setiap jenjang organisasi yang mencakup komisaris, manajemen, dan personel lain.
- c. Pengendalian intern dapat diharapkan untuk mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dari pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
- d. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, ketaatan, dan efektivitas dan efisiensi operasi entitas. (Tjakrawala, 2003).

Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk focus pada aspek pengendalian intern yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan (Anthony and Govindarajan, 2001). Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga aset dari kerugian. Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan intern maupun ekstern yang mememuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuat-pembuat standar yang diakui ataupun kebijakan-kebijakan entitas.

Sementara itu, tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan mana entitas merupakan subjeknya.

Tujuan-tujuan pengendalian intern dalam versi ICIF COSO (2013) pada dasarnya relatif sama dengan yang dikemukakan pada tahun 1992, namun tujuan-tujuan tersebut mengalami perluasan, misalnya pada tujuan-tujuan operasi yang tidak hanya mencakup kinerja keuangan dan pengamanan aset saja, tetapi juga operasi entitas secara keseluruhan. Sebagai perbandingan, tujuan-tujuan pengendalian intern yang dirumuskan oleh IAI (2001: 319) adalah: (1) keandalan pelaporan keuangan; (2) efektivitas dan efisiensi operasi; dan (3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya Tunggal (2005:254) menyatakan bahwa tujuan pengendalian intern adalah: (1) Efektifitas dan efisiensi operasi; (2) Keandalan pelaporan keuangan; dan (3) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan tujuan pengendalian intern di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian intern mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

- a. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

- c. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

Ketiga tujuan pengendalian intern tersebut merupakan hasil (output) dari suatu pengendalian intern yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian intern yang merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian intern yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian intern tercapai, maka organisasi harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran - ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dengan demikian, pengendalian intern yang memadai akan menciptakan tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik. Menurut M. Ikhsan, dkk, 2011 : 9.7 mengemukakan " bahwa pada dasarnya anggaran disusun untuk memudahkan manajemen dalam mengelola berbagai aktivitas organisasinya. Anggaran merupakan bentuk pelaksanaan salah – satu fungsi manajemen, yakni perencanaan ". Terkait dengan hal itu, maka APBD Kabupaten Nduga merupakan salah satu wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda APBD Kabupaten Nduga). Bab I Pasal 1 ayat 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa " Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah ". Untuk Kabupaten Nduga bahwa pengelolaan keuangan daerah dengan sistem aplikasi dan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Sistem pertanggungjawaban mengacu pada Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Kedua Permendagri tersebut diikuti dengan Standar Operasioan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nduga yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Nduga.

Bertolak dari teori – teori di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/ daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama 1 tahun anggaran. Adapun menurut para ahli, pengertian laporan keuangan antara lain:

Fraser dan Aileen (2008: 5) menyatakan bahwa, "Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan perusahaan yang terpenting". Selanjutnya Munawir (2010:31) mengatakan bahwa, "Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan

dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”.

Laporan keuangan bertujuan sebagai alat pemberi informasi bagi pemakainya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibuat setiap semester dan tahunan. Laporan Keuangan Pemerintah merupakan laporan keuangan gabungan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan.

Menurut PSAK No. 1, 2012 bahwa, “Tujuan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Selanjutnya Mardiasmo (2009:159) mengatakan bahwa, ‘Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik’. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 yang telah direvisi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara garis besar, "tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah: (1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan; dan (2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Selanjutnya tujuan khusus penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah: (1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah; (2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya; (3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan; (4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional; dan (5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional" (Mardiasmo, 2009).

Jelas, bahwa penyajian laporan keuangan tersebut dapat memberikan gambaran baik secara umum maupun secara khusus tentang pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut pula dapat dijadikan indikator penilaian oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPKP maupun BPK – RI sebagai pengawas eksternal.

"Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar " (Mulyadi, 2001).

Penyusunan laporan keuangan SKPD memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Akuntabilitas

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya alam serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada para SKPD selaku pengguna anggaran.

2. Manajemen

Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut (Lampiran E Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 : 16)

"Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: (a) masyarakat, (b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses

donasi, investasi dan pinjaman; dan (d) Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum guna memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna" (Abdul Hafiz 2009: 8).

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah Laporan Keuangan meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut. (Komite SAP: 2005:2). Jadi, sistem pengawasan adalah serangkaian kegiatan meneliti, mengendalikan, memeriksa serta menguji setiap aktivitas mulai dari input, proses serta outputnya agar aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. (Abdul Hafiz 2009 : 9)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik yang diperlukan menurut Abdul Hafiz (2009:11) adalah sebagai berikut:

a. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan, yaitu: (1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), (2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*); (3) tepat waktu; dan (4) lengkap.

b. Andal

Andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas. Jadi, agar bermanfaat,

informasi harus andal (*reliable*), informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan dapat disajikan.

c. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara *relative*. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Sehingga Dapat disimpulkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat di bandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar, namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat

dipahami oleh pemakai tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh penggunanya.

Selanjutnya laporan keuangan pemerintahan di Indonesia paling tidak terdiri atas:

a. Laporan Realisasi anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang tercakup terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang tercakup terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Menurut Abdul Hafiz (2009:238) bahwa, "Laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan." Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Abdul Hafiz (2009:205) bahwa, "Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pokok lainnya". Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya (PP.No. 24: 2005: 6)

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi yang diterima umum. " Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan " (Hariadi, 2010: 115).

Hariadi (2010) bahwa "karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya". Adapaun unsur-unsur kualitas dari laporan keuangan daerah, sebagai berikut: 1). Relevan, 2). Andal, 3). Dapat dibandingkan, 4). Dapat dipahami, 5). Memiliki manfaat umpan balik, 6). Memiliki manfaat

prediktif, 7). Tepat waktu, 8). Lengkap, 9). Penyajian jujur, 10). Dapat diverifikasi, 11). Dapat dipahami penggunaannya, 12). Memiliki unsur netralitas.

Hasil pemeriksaan keuangan dapat berupa suatu pernyataan opini/tanggapan tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini pemeriksa tersebut adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (tentang pengelolaan keuangan) yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) = "kejujuran untuk/dalam menjelaskan";
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian (Reksohadiprodjo *dalam* Hariadi, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nduga adalah memberikan gambaran dan penilaian mengenai kondisi dan kinerja proses pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Nduga yang dibuat dan disusun setiap semester/tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun komponen – komponen dari penilaian penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Nduga, meliputi: (1) relevan dalam memenuhi kebutuhan proses pengambilan keputusan; (2) Andal dalam menyajikan informasi laporan keuangan; (3) Laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode; (4) Dapat dipahami informasi yang ditampung dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, keempat indikator tersebut perlu dikaji dan diteliti karena diyakini mampu membentuk variabel laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Nduga.

Salah satu upaya melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah adalah melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Dari pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. " Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif " (Tugiman, 2006).

"Alasan atau latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket Reformasi Keuangan Negara menuju *Good Governance* atau tata kelola yang baik dan *Good Geverment*. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diadopsi dari konsep internal control yang dikeluarkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasinya menggunakan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*), Pengendalian Intern (*Internal Control*) dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud Deterrence*). COSO memiliki prinsip dasar *good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations*" (Bambang Utoyo, 2011: 50-51).

Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan birokrasi yang kuat untuk menuju cita-cita yang diharapkan melalui penerapan pengendalian intern, yakni : "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih menitikberatkan pada *soft controlnya* meliputi etika, moral, integritas, kejujuran,

disiplin, kompetensi, komitmen dan perangkat lunak lainnya. SPIP diadopsi dari COSO " (Moeller, 2007).

"Internal Control Framework dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP ini bersifat integrated dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh Instansi Pemerintah serta bersifat dinamis dan seiring dengan perkembangan jaman" (Tugiman, 2001).

Moeller (2007: 4) menuliskan pengertian internal control menurut COSO adalah:

Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations.

Unsur-unsur yang ada dalam SPIP mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara yang meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern.

Menurut Moeller (2007:4-5), model internal control versi Coso dapat digambarkan sebagai rubic cube, dimana penerapan kelima unsurnya saling menguatkan disesuaikan dengan bentuk organisasinya dengan kepatuhan pelaporan operasi keuangan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan peraturan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) yang merupakan adopsi dari *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)*

Internal Control Framework dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP ini bersifat *integrated* dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh Instansi Pemerintah serta bersifat dinamis dan mengikuti seiring dengan perkembangan jaman.

Unsur-unsur sistem pengendalian intern berdasarkan COSO, antara lain :

a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian menurut COSO (2013:4) adalah sebagai perangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Jadi, lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang menyediakan disiplin dan struktur. Unsur-unsur lingkungan pengendalian, meliputi: (1) penegakan integritas & nilai etika; (2) kepemimpinan yang kondusif; (3) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan (4) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal. Untuk mendapatkan

lingkungan pengendalian yang baik diperlukan adanya pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut (Mahmudi, 2010), yaitu :

" 1). Penegakan integritas dan nilai-nilai melalui kode etik keprofesiannya, nilai-nilai etika yang berlaku secara umum di masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2). Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, melalui proses rekrutmen sebagai pegawai dengan mengisi formasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahlian calon pegawai; 3). Pengendalian memerlukan adanya pemimpin yang kondusif, dimana pimpinan tahu kapan harus menjadi seorang pemimpin yang memberikan arahan kepada bawahannya, dan kapan harus menjadi tempat yang tepat bagi bawahannya untuk mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapinya; 4) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dilakukan dengan memberikan Surat Tugas dan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 5). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM melalui pelaksanaan diklat-diklat penjurangan ataupun pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai. Penerapan kebijakan ini dapat dilihat dari prosentase anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur; 6). Penegakan lingkungan pengendalian yang kondusif juga dilakukan oleh Inspektorat sebagai *early warning system* yang memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, anggaran, dan aset daerah.

Penegakan lingkungan pengendalian ini merupakan bentuk *soft control* dari para pelaksana kegiatan sebagaimana yang disampaikan Boynton and Kell (2001), bahwa lingkungan pengendalian menentukan irama sebuah organisasi, membentuk kesadaran pengendalian dari orang-orangnya dan menjadikannya sebagai dasar dari semua unsur pengendalian intern dengan penegakan disiplin dan tata kelolanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian merupakan perangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh unsur-unsur: (1) penegakan integritas & nilai etika; (2) pimpinan yang

kondusif dalam mengatasi masalah; (3) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; dan (4) Penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai. Keempat unsur lingkungan pengendalian tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk lingkungan pengendalian dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

b. Penilaian resiko (*Risk Assessment*)

Langkah awal dalam mengelola risiko dengan baik adalah melakukan *Risk Assessment* (identifikasi dan evaluasi risiko yang melekat pada organisasi) sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas risiko serta daftar respon risiko (Wongso, 2010). Namun, pada pelaksanaannya masih berupa mengenali risiko-risiko dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Menurut Utoyo (2011), " untuk dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi diperlukan adanya penyatuan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*), Pengendalian Intern dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud Deterrence*). Prinsip dasar pengendalian internal versi COSO adalah *good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations* ",

Arens dan Loebbecke dalam Jusuf (2003:263) menyatakan bahwa " penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum " . Penilaian risiko

manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

- 1) Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.
- 2) Perubahan standar akuntansi
- 3) Hukum dan peraturan baru
- 4) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
- 5) Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi perubahan dan pelaporan (Halim, 2003).

Penilaian risiko yang berhubungan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan bagian dari kriteria manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. PSA 07 (SA 326) menggolongkan lima kategori pernyataan yang luas berkaitan dengan penilaian risiko sebagai berikut: " 1). Keberadaan atau keterjadian merupakan asersi yang berkaitan dengan apakah aktiva, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan rugi laba benar-benar terjadi selama periode akuntansi; 2). Kelengkapan yang menyatakan bahwa semua transaksi dan akun yang selayaknya ada dalam laporan keuangan semuanya memang dimasukkan; 3). Hak dan kewajiban merupakan asersi manajemen yang berhubungan dengan apakah aktiva memang menjadi hak dan hutang yang menjadi kewajiban pada tanggal tertentu; 4). Penilaian dan alokasi merupakan asersi yang menyangkut apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau beban telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan angka-angka yang benar; 5). Penyajian dan pengungkapan merupakan asersi yang menyangkut apakah komponen-komponen dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan dengan sepantasnya " (Mulyadi, 2001).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Unsur-unsur penilaian risiko yang dimaksudkan dalam penelitian

ini, antara lain: (1) Keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah; (2) Kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan; (3) Penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan; dan (4) Penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan. Keempat unsur penilaian risiko tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk penilaian risiko dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

c. Kegiatan pengendalian (*Control Activities*)

" Kegiatan pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kegiatan-kegiatan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Kegiatan pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan atas lingkungan teknologi " (Tunggal, 2005).

Arens dan Loebbecke dalam Jusuf (2003:263) menyatakan bahwa " kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur selain dari empat komponen yang lain yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya. Selanjutnya menurut COSO (2013:7) bahwa " aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi ". Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta dan pemisahan fungsi. Ada 3 (tiga) prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian dalam organisasi (Moeller, 2007), yaitu:

"1). Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima. 2). Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan; 3). Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan".

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2001:319), prosedur pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam prosedur yang bersangkutan dengan hal-hal berikut:

1) Otorisasi yang semestinya atas transaksi dari kegiatan

Dalam organisasi, setiap transaksi yang terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

2) Pemisahan tugas yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi kekeliruan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, termasuk tanggungjawab untuk memberikan otorisasi transaksi, mencatat transaksi, dan menyimpan aktiva perlu dipisahkan.

3) Perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai untuk membantu pencatatan secara semestinya transaksi dan peristiwa. Unsur pengendalian intern yang harus dipertimbangkan adalah: (1) perancangan dokumen bernomor urut tercetak; (2) pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi atau segera setelah transaksi terjadi; (3) perancangan dokumen dan catatan harus cukup sederhana untuk menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan tersebut; (4) sedapat mungkin dokumen dirancang untuk memenuhi berbagai keperluan

sekaligus; dan (5) perencanaan dokumen dan catatan yang mendorong pengisian data dengan benar.

- 4) Pengamanan yang cukup atas akses penggunaan aktiva dan catatan. Pembuatan kembali catatan yang rusak akan memerlukan biaya besar dan waktu yang banyak. Dengan demikian, akan lebih baik mengeluarkan biaya untuk perawatan dan penjagaan catatan dokumen daripada biaya untuk penggantian.
- 5) Pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya atas jumlah yang dicatat. Hal ini berkaitan dengan struktur pengendalian intern yang cenderung mengalami perubahan karena waktu yang berubah. Oleh karenanya diperlukan penelaahan secara terus menerus terhadap unsur-unsur struktur pengendalian intern guna menjamin bahwa setiap personil melaksanakan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, diperlukan pengecekan secara independen terhadap kinerja personilnya.

Prosedur pengendalian diperlukan untuk memantapkan langkah dalam penerapan struktur pengendalian intern dalam melengkapi pembentukan lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang berlaku dalam organisasi. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui:

- 2) Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis serta mengevaluasi kegiatan pengendalian tersebut secara teratur untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi bahwa kegiatan masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

- 3) Review atas kinerja dilakukan sebatas formalitas untuk memenuhi kebutuhan permintaan data.
- 4) Pembinaan SDM dengan memberikan rewards berupa promosi dan mengikuti pendidikan/pelatihan yang ditawarkan/direncanakan dalam program/kegiatan intern dan punishment berupa sanksi oleh atasan langsung ataupun melalui pemanggilan langsung oleh inspektorat.
- 5) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh satu seksi yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan jaringan dan sebagai pengelola digunakan operator secara khusus untuk menjalankannya dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan evaluasi.
- 6) Pengendalian fisik atas aset dilakukan dengan penatausahaan aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja menggunakan Standar Pelayanan Minimal, Millenium Development Goals, Analisis Standar Biaya, dan indikator-indikator lainnya.
- 8) Pemisahan fungsi dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas, sebagai kepanjangan tangan dari eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas anggaran dinas yang merupakan manifestasi dari pelayanan publik dengan melaksanakan pemisahan fungsi untuk melaksanakan tugas pokok yang diembannya dengan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.
- 9) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dibantu oleh bendahara pembantu

dalam menatausahakan setiap belanja yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 10) Pencatatannya yang akurat, tepat waktu dilakukan melalui BKU, Kartu Kendali Kegiatan, dan bentuk pencatatan lainnya. Yuwono (2005) menyampaikan bahwa pengendalian memiliki karakteristik, yaitu sistem akuntansi yang dapat memberikan jaminan bahwa sumber daya digunakan untuk kegiatan dengan tujuan spesifik.
- 11) Pembatasan atas akses sumber daya dan pencatatannya terbatas kepada yang memiliki kepentingan terhadap pembuatan laporan.
- 12) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- 13) Pencatatan dibuat laporan yang akuntabel dan terdokumentasi dengan baik dan bersifat transparan. Laporan-laporan tidak hanya bersifat laporan anggaran saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya pada departemen atau organisasi yang ada di atasnya dan termasuk prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dimaksudkan dalam penelitian ini, meliputi:

- (1) prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi;
- (2) pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi;

(3) perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi;

(4) Pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi.

Keempat unsur kegiatan pengendalian tersebut menjadi indikator dalam penelitian ini, karena diyakini mampu membentuk variabel - variabel kegiatan pengendalian dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

d. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggungjawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. " Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal " (Susanto, 2004).

Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus menerus, berulang, dan berbagi. " Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. Sistem informasi berbasis komputer, dan laporan dapat disampaikan secara tepat waktu dengan tingkat akurasi yang tinggi dan selalu melakukan pembaharuan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan " (Hindriani, 2012).

Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif antar komponennya dengan informasi yang berkualitas (Mulyana, 2005). Selanjutnya menurut Yuwono, dkk (2005), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk

aplikasi komputer dengan karakteristik *double entry* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel. Sehingga, dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

Ada 3 (tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern, yaitu: 1). Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian intern; 2). Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggungjawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian intern; 3). Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian intern (COSO, 2013:7).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi & komunikasi adalah proses pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan melaksanakan tanggungjawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur informasi & komunikasi dalam penelitian ini, antara lain: (1) Organisasi menghasilkan informasi berkualitas; (2) Organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern; (3) Organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung pengendalian intern; dan (4) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus. Keempat unsur informasi & komunikasi tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk variabel informasi & komunikasi dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian intern mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen ada dan berfungsi. "Evaluasi berkesinambungan dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas guna menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas evaluasi, dan pertimbangan manajemen lainnya" (Tunggal, 2005).

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian intern yang telah dilakukan secara memadai atau tidak.

"Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan monitoring pengelolaan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, pemanggilan secara langsung oleh kepala dinas jika membutuhkan informasi terkait dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya disampaikan kontrol dibentuk oleh lingkungan, artinya lingkungan yang mengendalikan, bagaimana seorang pimpinan harus bersikap terhadap bawahannya, dan sebaliknya, sehingga komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan menjadi salah satu bentuk kontrol yang dilakukan secara dini" (Hindriani, 2012).

Budiharto (2008: 13) " mengemukakan bahwa pengawasan melekat (*built in control*) adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung "terhadap pekerjaan" dan "hasil kerja" bawahannya, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-

ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan" . Selanjutnya hasil penelitian Fuadi (2008: 15) " juga menunjukkan bahwa dalam pengawasan preventif dijadikan sebagai pengendalian awal terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan demikian realisasi anggaran yang dilakukan akan lebih terarah dalam pencapaian sasaran anggaran dan penyimpangan lebih terminimalisir karena pelaksanaan anggaran telah diatur dengan prosedur pelaksanaan " .

Pemantauan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Besar kecilnya aktivitas pemantauan yang diperlukan suatu organisasi tergantung dari keempat unsur SPIP yang lain. Sinamo (2010:24) mengartikan pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, operasi pengendalian, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan melalui pemantauan berkelanjutan (*on going monitoring*), evaluasi terpisah (*separate evaluation*), dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Menurut Arens dan Loebbeeke dalam Jusuf (2003:54), pemantauan berkaitan dengan hal-hal berikut:

- a. Frekuensi penilaian aktivitas yang merupakan tingkat keseringan dari kegiatan penilaian aktivitas;
- b. Fungsi internal audit yakni efektif atau tidaknya fungsi dari internal audit yang ditandai dengan adanya dukungan kompetensi, integritas dan objektivitas

- c. Saran dari akuntan, dimana tanggungjawab untuk menentukan kebijakan akuntansi yang sehat dan terlaksananya struktur pengendalian intern dengan baik serta tersajinya laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen, bukannya auditor, namun auditor berkewajiban memberikan saran-sarannya.
- d. Rekonsiliasi laporan, yang merupakan rekonsiliasi secara periodik antara fisik aktiva dengan catatan-catatan atau perkiraan-perkiraan buku besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemantauan adalah kegiatan evaluasi kinerja pengendalian intern sepanjang waktu sehingga memastikan semuanya dijalankan sesuai yang diinginkan dengan perubahan keadaan. Unsur-unsur pemantauan pengendalian intern dalam penelitian ini, antara lain: (1) Frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern; (2) Fungsi internal audit; (3) Saran dari akuntan; dan (4) Rekonsiliasi laporan secara periodik. Keempat unsur pemantauan pengendalian tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk variabel pemantauan pengendalian dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga

B. Penelitian Terdahulu

Kajian ini akan membahas beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan rencana penelitian, sebagai bahan perbandingan dan rekomendasi peneliti.

- b. Liana (2011), dengan penelitian yang berjudul: "Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia terhadap Pemberian Opini oleh BPK". Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pemberian opini BPK yang

dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia untuk LKPD tahun anggaran 2009. Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah kota dan kabupaten terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip sekunder berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester untuk LKPD tahun anggaran 2009 yang diperoleh dari situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana dalam melakukan pengujian hipotesisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh positif terhadap opini BPK. Sedangkan kelemahan struktur pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap opini BPK.

- c. Hindriani, dkk (2012), dengan Jurnal Penelitian yang berjudul: "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)". Tujuan penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan SPIP dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan sistem pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

dengan tehnik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD; informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi tinggi melalui laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, namun masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan; dan Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Proses internalisasi SPIP perlu di dukung dengan penerapan hard control berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan Satuan Tugas (SATGAS) implementasi SPIP. Sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, melalui: 1) Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak; 2) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 3) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 4) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP.

- d. Numasingsih (2010), dengan penelitian yang berjudul: “*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai*”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri atas: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, dan pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri atas: penilaian resiko, aktivitas pengendalian, dan pengawasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai, sedangkan lingkungan pengendalian berpengaruh tidak signifikan. Variabel aktivitas pengendalian berpengaruh dominan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai.
- e. Syamsuddin (2010), dengan penelitian yang berjudul: “*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare*”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri atas: penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan pemantauan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare. Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri atas: kegiatan pengendalian, informasi, dan pemantauan pengendalian berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare, sedangkan penilaian resiko berpengaruh tidak signifikan. Variabel

kegiatan pengendalian berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dijadikan acuan dan perbandingan agar nantinya hasil penelitian yang dilakukan dapat melihat adanya perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu. Tentunya, hasil penelitian ini dapat sama dan dapat berbeda, karena adanya persamaan dan perbedaan dari variabel-variabel yang diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1. Analisis Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metodologi	Hasil Analisis	Analisis Kritis (Persamaan & perbedaan)
1.	Liana (2011)	Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia terhadap Pemberian Opini oleh BPK	Model analisis deskriptif dan analisis Regresi Linier Berganda dengan software SPSS.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh positif terhadap opini BPK. Sedangkan kelemahan struktur pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap opini BPK	Persamaan: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Perbedaan: Pemberian Opini oleh BPK
2.	Hindriani, dkk (2012),	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)	jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif	SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.	Persamaan: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Perbedaan: Perencanaan & Pelaksanaan Anggaran
3.	Nurmasingsih (2010)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai	Model analisis deskriptif dan analisis Regresi Linier Berganda dengan software SPSS.	Sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri atas: penilaian resiko, aktivitas pengendalian, dan pengawasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai, sedangkan lingkungan pengendalian berpengaruh tidak signifikan. Variabel aktivitas pengendalian berpengaruh dominan terhadap laporan keuangan pemerintah.	Persamaan: - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - laporan keuangan pemerintah Perbedaan: pengawasan
4.	Syamsuddin (2010),	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare	Model analisis deskriptif dan analisis Regresi Linier Berganda dengan software SPSS.	Sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri atas: kegiatan pengendalian, informasi, dan pemantauan pengendalian berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare, sedangkan penilaian risiko berpengaruh tidak signifikan. Variabel kegiatan pengendalian berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Persamaan: - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - laporan keuangan pemerintah Perbedaan: Kualitas LK Lingkungan pengendalian

Sumber: Mapping Penelitian Sebelumnya

C. Kerangka Berpikir

Pemerintah daerah sebagai pihak yang ditugasi menjalankan roda pemerintahan pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel (Suprpto, 2006).

Laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nduga. Laporan keuangan tersebut dibuat setiap semester/tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Komponen dari laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah pada umumnya terdiri atas: (1) Laporan realisasi anggaran (LRA); (2) Neraca; (3) Laporan arus kas; dan (4) Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya Abdul Hafiz (2009:11) " mengemukakan karakteristik yang diperlukan untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain: relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami ". Keempat komponen tersebut menjadi dasar dalam penentuan indikator yang akan mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, yakni: (1) relevan dalam memenuhi kebutuhan proses pengambilan keputusan; (2) Andal dalam menyajikan informasi laporan keuangan; (3) Laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode; dan (4) Dapat dipahami informasi yang ditampung dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, keempat indikator tersebut

perlu dikaji karena diyakini mampu membentuk variabel laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Nduga.

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nduga sangat ditentukan oleh sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern yang memadai akan menciptakan tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian resiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, dan 5) Pemantauan pengendalian (COSO, 2013:4). Kelima komponen SPIP tersebut menjadi variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini.

"Konsep lingkungan pengendalian menurut COSO (2013:4) adalah sebagai perangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Unsur-unsur lingkungan pengendalian, antara lain: (1) penegakan integritas & nilai etika; (2) pimpinan yang kondusif dalam mengatasi masalah; (3) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; dan (4) Penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai " .

Keempat unsur lingkungan pengendalian tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk lingkungan pengendalian dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

"Konsep penilaian risiko menurut COSO (2013:4) adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Unsur-unsur penilaian risiko, antara lain: (1) Keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah; (2) Kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan; (3) Penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan; dan (4) Penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan".

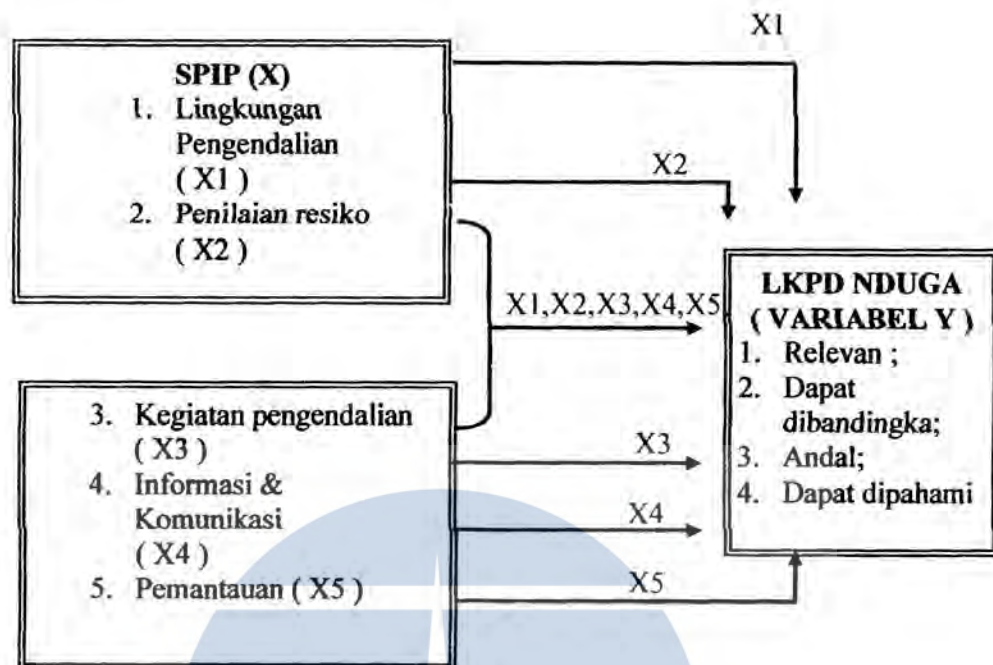
Keempat unsur penilaian risiko tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk penilaian risiko dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Konsep kegiatan pengendalian menurut COSO (2013:5) adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Unsur-unsur dalam kegiatan pengendalian, antara lain: (1) prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi; (2) pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi; (3) perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi; dan (4) Pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi. Keempat unsur kegiatan pengendalian tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk variabel kegiatan pengendalian dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Konsep informasi & komunikasi menurut COSO (2013:5) adalah proses pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan melaksanakan tanggungjawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur informasi & komunikasi, antara lain: (1) Organisasi menghasilkan informasi berkualitas; (2) Organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern; (3) Organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat

dalam mendukung pengendalian intern; dan (4) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus. Keempat unsur informasi & komunikasi tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk variabel informasi & komunikasi dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Konsep pemantauan pengendalian menurut COSO (2013:5) adalah kegiatan evaluasi kinerja pengendalian intern sepanjang waktu sehingga memastikan semuanya dijalankan sesuai yang diinginkan dengan perubahan keadaan. Unsur-unsur pemantauan pengendalian, antara lain: (1) Frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern; (2) Fungsi internal audit; (3) Saran dari akuntan; dan (4) Rekonsiliasi laporan secara periodik. Keempat unsur pemantauan pengendalian tersebut menjadi indikator penelitian karena diyakini mampu membentuk variabel pemantauan pengendalian dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang meliputi 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian resiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, dan 5) Pemantauan pengendalian menjadi variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini karena diyakini memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan pengaruh antara variabel yang akan diteliti, dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir dalam Penelitian.

D. Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan makna dan maksud dari variabel penelitian serta indikator – indikator dalam penelitian. Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan pada masing – masing variabel dengan cara memberikan arti dan pengertian secara khusus terhadap variabel penelitian tersebut, mengspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel yang diteliti. Untuk menyamakan persepsi dalam penelitian ini, maka ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Laporan keuangan pemerintah (Y) adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nduga yang dibuat setiap semester/tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Indikator yang digunakan adalah: (a) relevan dalam memenuhi kebutuhan proses pengambilan keputusan; (b) Andal dalam menyajikan informasi laporan keuangan; (c) Laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode; dan (d) Dapat dipahami informasi yang ditampung dalam laporan keuangan. Penilaian indikator menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima kategori, yaitu: sangat setuju (5), setuju (4), cukup setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1).
2. Lingkungan pengendalian (X_1) adalah suatu kondisi pengendalian sebagai perangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal pemerintah di Kabupaten Nduga. Indikator yang digunakan adalah: (a) penegakan integritas & nilai etika; (b) pimpinan yang kondusif dalam mengatasi masalah; (c) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; dan (d) Penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai. Penilaian indikator menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima kategori, yaitu: (SS) sangat setuju (5), (S) setuju (4), (CS) cukup setuju (3), (TS) tidak setuju (2), dan (STS) sangat tidak setuju (1).
3. Penilaian risiko (X_2) adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Indikator yang digunakan

adalah: (a) Keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah; (b) Kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan; (c) Penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan; dan (d) Penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan. Penilaian indikator menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima kategori, yaitu: sangat setuju (5), setuju (4), cukup setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1).

4. Kegiatan pengendalian (X_3) adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Indikator yang digunakan adalah: (a) prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi; (b) pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi; (c) perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi; dan (d) Pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi. Penilaian indikator menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima kategori, yaitu: sangat setuju (5), setuju (4), cukup setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1).
5. Informasi & komunikasi (X_4) adalah proses pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan melaksanakan tanggungjawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Indikator yang digunakan adalah: (a) Organisasi menghasilkan informasi berkualitas; (b) Organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern; (c) Organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung

pengendalian intern; dan (d) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus. Penilaian indikator menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima kategori, yaitu: sangat setuju (5), setuju (4), cukup setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1).

6. Pemantauan (X_5) adalah kegiatan evaluasi kinerja pengendalian intern sepanjang waktu sehingga memastikan semuanya dijalankan sesuai yang diinginkan dengan perubahan keadaan. Indikator yang digunakan adalah: (a) Frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern; (b) Fungsi internal audit; (c) Saran dari akuntan; dan (d) Rekonsiliasi laporan secara periodik. Penilaian indikator menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima kategori, yaitu: sangat setuju (5), setuju (4), cukup setuju (3), tidak setuju (2). Sangat tidak setuju (1)

E. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua.
2. Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.
3. Kegiatan pengendalian yang berpengaruh dominan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian konklusif kausal (yaitu hubungan sebab akibat), dimana hubungan tersebut dalam bentuk hubungan positif atau negatif serta kuatnya hubungan tersebut dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. " Korelasi ganda (*multiple correlation*) merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen " (Sugiyono, 2010 : 224).

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei analitik yaitu: menganalisis fakta dan data-data yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nduga.

Adapun variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri atas: lingkungan pengendalian (X_1), penilaian risiko (X_2), kegiatan pengendalian (X_3), informasi & komunikasi (X_4), dan pemantauan (X_5) sebagai variabel independen dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga sebagai variabel dependen (Y).

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka atau laporan.
- b) Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi atau keterangan ketemagan yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk non angka.

2. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode observasi dari responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain melalui dokumentasi, atau laporan tertulis lainnya.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2004: 90), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nduga yang berjumlah 40 orang responden.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau bagian dari unit populasi. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus yaitu seluruh

populasi dijadikan responden. Dengan demikian, jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 40 orang responden.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (angket) adalah seperangkat pertanyaan – pertanyaan yang diberikan kepada responden dan dijawab untuk digunakan mengubah berbagai keterangan yang langsung diberikan menjadi data, serta dapat pula digunakan untuk mengungkapkan pengalaman – pengalaman yang telah dialami oleh subjek pada masa lampau maupun pengalaman – pengalaman masa kini terkait dengan isi kuesioner tersebut. Jadi, Kuesioner (angket) untuk pengumpulan data Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Variabel X1, X2, X3, X4 dan X5) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nduga (Variabel Y).

“ Keterangan yang diberikan oleh subjek ini dapat diubah menjadi data kuantitatif (angka – angka) atau penilaian secara kualitatif pada kriteria – kriteria tertentu dengan cara menghitung jumlah jawaban yang diberikan oleh subjek (Sukardi, 1988 : 108).

Dalam penyusunan skala itu dapat menggunakan skala Metode Likeerts, dengan alternatif pilihan jawaban sebagai berikut : (Sangat setuju) skor 5, Setuju skor 4, Cukup setuju skor 3, Tidak setuju skor 2 , Sangat tidak setuju skor 1. Kuesioner (angket) penelitian ini tertera pada lampiran 1.

2 . Dokumentasi

Dokumentasi adalah menggunakan data yang telah ada, khususnya data – data yang berhubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Nduga serta catatan tentang opini hasil penilaian pemeriksaan BPK – RI setiap tahunnya. Hal tersebut digunakan untuk mengungkap Variabel Y.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Bertolak dari instrumen penelitian yang ditampilkan di atas dengan menggunakan Kuesioner (angket) sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pertama – tama angket disebarakan kepada sampel sebanyak 40 orang dengan batas waktu yang ditentukan dan mengisi angket tersebut dengan kode sampel ditulis oleh peneliti untuk memudahkan pengkodean kembali pada saat editing (penyuntingan data). Angket telah disebarakan jauh sebelum adanya ijin penelitian, hal ini dilakukan guna mengantisipasi setiap responden (pegawai) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dapat memperoleh, memberikan jawaban serta mengumpul angket tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan dem kebutuhan pengolahan data penelitian. Pada saat pengumpulan angket harus diteliti kembali dari penyebaran angket, agar tidak ada angket yang tidak kembali atau belum selesai diisi oleh sampel dalam penelitian ini. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik dan utuh. Pemeriksaan data dilakukan terhadap jawaban yang telah diberikan oleh para sampel melalui kuesioner tersebut termasuk kelengkapan pengisian jawaban.

E. Metode Analisis Data

Untuk mengolah data hasil penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif, yaitu digunakan untuk menguraikan secara deskriptif karakteristik responden dan variabel-variabel penelitian melalui distribusi frekuensi, rata-rata dan persentase.
2. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri atas: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana:

- Y = Laporan keuangan pemerintah
- b_0 = Intercept/konstanta
- X_1 = Lingkungan pengendalian
- X_2 = Penilaian risiko
- X_3 = Kegiatan pengendalian
- X_4 = Informasi & komunikasi
- X_5 = Pemantauan
- $b_1 - b_5$ = Koefisien Regresi
- e = *Distrubance Error*

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji-F (uji Model)

Uji ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan pengaruh antara variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5) secara serempak atau bersama-sama dengan variabel terikat (Y).

b. Uji-t (parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan pengaruh antara variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5) secara parsial (sendiri-sendiri) dengan variabel terikat (Y). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada taraf signifikan 5 %. Adapun persyaratan uji-t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat dan ada pengaruh diantara kedua variabel yang akan diuji.
- 2) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat dan tidak ada pengaruh diantara kedua variabel yang akan diuji.

c. Uji determinansi R^2

Koefisien korelasi R menunjukkan besar kecilnya keeratan hubungan (korelasi) antara variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat. Sedangkan nilai R^2 menunjukkan koefisien determinasi yaitu mengukur besarnya perubahan variabel terikat yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebas secara bersama-sama.

d. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Uji validitas data digunakan sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Menurut Sugiyono (2004:271), apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan dianggap valid. Pengujian validitas dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu: a) Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur; b)

Melakukan uji coba skala pengukuran dengan menggunakan responden;
c) Mempersiapkan tabel jawaban; dan d) Menghitung korelasi bivariate dengan menggunakan program SPSS.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu indeks tentang sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Jika suatu alat ukur dapat digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya diproses relatif secara konsisten, maka alat ukur tersebut dianggap reliabel. Artinya suatu alat ukur yang digunakan konsisten dalam mengukur gejala yang sama. Menurut Sugiyono (2004:273) " bahwa uji reliabilitas ditentukan dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan mensyaratkan suatu instrumen yang reliable jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 ".

e. Uji Asumsi Klasik

1). Normalitas

Dalam melakukan uji regresi disyaratkan agar data yang digunakan normal. Pada penelitian ini untuk mengetahui normalitas distribusi data dilakukan dengan melihat nilai residual pada model regresi yang akan diuji. Jika residual berdistribusi normal maka nilai sebaran data akan terletak di sekitar garis lurus (Sugiyono, 2004).

Normal-tidaknya distribusi data suatu peubah ditunjukkan oleh besarnya nilai *Asymptotic significant* dari aplikasi alat uji *One-sample Kolmogorov-Smirnov*. Apabila *Asymptotic significant* data lebih besar daripada 5%, maka data tersebut tergolong memiliki pola distribusi normal.

Sebaliknya, apabila *Asymptotic significant* kecil daripada atau sama dengan 5%, maka data dimaksud memiliki pola distribusi tidak normal (Hair, et.al, 1998).

2) . Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi bebas (independen). Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel bebas. Keberadaan multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) atau nilai toleransinya. Keberadaan multikolinearitas dapat diketahui apabila nilai $VIF > 10$ atau secara kebalikannya dengan melihat nilai toleransinya $< 0,1$ dan sebaliknya. Bila nilai VIF dari masing-masing variabel < 10 , dan nilai toleransinya $> 0,1$, maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas atau hubungan yang terjadi antar variabel bebas dapat ditoleransi sehingga tidak akan mengganggu hasil regresi.

3). Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual yang disebut heterokedastisitas, sedangkan adanya gejala varians residual yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut homokedastisitas.

Heterokedastisitas akan muncul apabila terdapat pola tertentu antar keduanya seperti pola bergelombang dan kontinyu atau menyempit atau melebar teratur. Homokedastisitas akan muncul apabila tidak diperoleh pola yang jelas atau titik-titik yang diperoleh menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga tidak menghasilkan parameter bias yang menyebabkan kesalahan dalam perlakuannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

I. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nduga. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan instansi ini bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah, sehingga sistem pengendalian intern sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nduga di masa akan datang. Alasan kedua dipilih sebagai lokus penelitian ini, karena berbicara tentang laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas dan tanggungjawab Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan pada pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga yang berjumlah 40 orang responden, yang meliputi: jenis kelamin, tingkat umur, dan tingkat pendidikan. Adapun karakteristik responden, dapat dijelaskan sebagai berikut:

b. Jenis kelamin

Jenis kelamin atau gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun karakteristik responden menurut jenis kelamin pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	29	72,50
2.	Perempuan	11	27,50
	Jumlah	40	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa komposisi responden menurut jenis kelamin yang terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki yakni 29 orang (72,50), sedangkan perempuan sebanyak 11 orang (27,50), artinya laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini menjadi karakteristik tersendiri karena beban kerja dan wilayah kerja yang lebih banyak menggunakan faktor fisik sehingga jenis kelamin laki-laki lebih dominan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.

c. Tingkat Umur

Usia sangat menentukan tingkat prestasi kerja pegawai pada sebuah organisasi. Dengan tingkat usia yang masih produktif akan berpengaruh terhadap penyelesaian tugas dan tanggungjawab pegawai yang tentunya memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nduga.

Tingkat umur responden yang terkecil adalah 26 tahun dan terbesar adalah 48 tahun. Adapun distribusi responden menurut tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Distribusi Responden menurut Tingkat Umur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

No.	Tingkat Umur (tahun)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	≤ 31	9	22,5
2.	32 – 37	9	22,5
3.	38 – 43	15	37,5
4.	≥ 44	7	17,5
Jumlah		40	100,0

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa responden yang memiliki proporsi tingkat umur terbanyak berada pada tingkat umur 38 – 43 tahun yakni 15 orang responden (37,5%), dan kemudian diikuti tingkat umur 32 – 37 tahun dan 31 tahun ke bawah masing-masing sebanyak 9 orang (22,5%), dan tingkat umur 44 tahun ke atas sebanyak 7 orang (17,5%). Tingkat umur tersebut tentu akan memberikan persepsi yang berbeda terkait dengan sistem pengendalian intern dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh responden sesuai dengan latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang ditekuninya dan diakui oleh pemerintah. Tingkat pendidikan formal itu akan membentuk cara berpikir seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang

terbaik terkait sistem pengendalian intern dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Adapun karakteristik responden menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Distribusi Responden menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	SLTA	10	25
2.	Diploma	6	15
3.	S1	23	57,5
4.	S2	1	2,5
Jumlah		40	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015

Data pada Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh data yang variatif. Data yang terjaring menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang menempati proporsi tertinggi adalah S1 sebanyak 23 orang (57,5%), kemudian diikuti oleh tingkat SLTA sebanyak 10 orang (25%), dan Diploma sebanyak 6 orang (15%), dan S2 sebanyak 1 orang (2,5%). Hal ini berarti tingkat pendidikan responden tergolong cukup memadai sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan yang obyektif tentang sistem pengendalian intern yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

2. Peraturan Perundang – Undangan yang Terkait Penelitian

Bertolak dari permasalahan dan kajian teori yang telah dikemukakan dalam penelitian, maka untuk mendukung hal tersebut diutarakan beberapa produk peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah maupun mengenai Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Terkait pemerintahan daerah dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. " Administrasi pemerintahan daerah adalah administrasi yang berkaitan dengan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat " (Diharna, 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bab 1 Pasal 1 ayat 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa " Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah ". Untuk Kabupaten Nduga bahwa pengelolaan keuangan daerah dengan sistem aplikasi dan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Sistem pertanggungjawaban mengacu pada Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 serta PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Kedua regulasi tersebut diikuti dengan Standar Operasioan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nduga yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Nduga.

B. Hasil Penelitian

Karakteristik setiap variabel yang menjadi obyek penelitian diolah dengan analisis statistik deskriptif, yaitu mendiskripsikan skor dari masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan 6 (enam) variabel, yaitu: laporan keuangan pemerintah (Y), lingkungan pengendalian (X_1), penilaian risiko (X_2), kegiatan pengendalian (X_3), komunikasi (X_4), pemantauan (X_5). Adapun deskriptif masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel laporan keuangan pemerintah (Y)

Laporan keuangan pemerintah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan yang dibuat setiap semester/tahunan sebagai pertanggung-

jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga. Indikator yang digunakan adalah: (1) relevan dalam memenuhi kebutuhan proses pengambilan keputusan; (2) Andal dalam menyajikan informasi laporan keuangan; (3) Laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode; dan (4) Dapat dipahami informasi yang ditampung dalam laporan keuangan.

Adapun distribusi frekuensi tanggapan responden tentang karakteristik kualitatif variabel laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Deskripsi Variabel Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nduga

Indikator	Jawaban Responden						Mean
	Ket.	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	
relevan dalam memenuhi kebutuhan pemakai	F	0	0	0	13	27	4,68
	%	0	0	0	32,5	67,5	
Andal dalam menyajikan informasi	F	0	0	2	13	25	4,58
	%	0	0	5,0	32,5	62,5	
Laporan keuangan dapat diperbandingkan	F	0	0	4	8	28	4,60
	%	0	0	10,0	20,0	70,0	
Dapat dipahami informasi LK	F	0	0	4	7	29	4,63
	%	0	0	10,0	17,5	72,5	

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Keterangan: STS = Sangat tidak setuju S = Setuju
 TS = Tidak Setuju SS = Sangat setuju
 CS = Cukup setuju F = Frekuensi

Tabel 5 menunjukkan indikator yang dominan dalam membentuk variabel laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga adalah indikator relevan dalam memenuhi kebutuhan proses pengambilan keputusan dengan nilai rata-rata skor 4,68, kemudian disusul indikator dapat dipahami informasi yang ditampung dalam laporan keuangan dengan nilai rata-rata skor 4,63, dan indikator laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode dengan nilai rata-rata skor 4,60.

Sedangkan indikator andal dalam menyajikan informasi laporan keuangan memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel laporan keuangan pemerintah, sehingga indikator tersebut perlu diberdayakan secara maksimal agar keandalan penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat diwujudkan. Meskipun demikian, kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga tergolong baik sehingga diharapkan kualitasnya dapat ditingkatkan di masa akan datang.

2. Variabel lingkungan pengendalian (X_1)

Lingkungan pengendalian adalah suasana pengendalian dalam suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran pegawai sebagai landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur atau sebagai perangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel lingkungan pengendalian adalah: (1) penegakan integritas & nilai etika; (2) pimpinan yang kondusif dalam mengatasi masalah; (3) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; dan (4) Penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai.

Adapun distribusi frekuensi tanggapan responden tentang lingkungan pengendalian pelayanan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Deskripsi Variabel Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

Indikator	Jawaban Responden						Mean
	Ket.	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	
Penegakan integritas dan nilai etika	F	0	0	0	12	28	4,70
	%	0	0	0	30,0	70,0	
pimpinan yang kondusif dalam mengatasi masalah	F	0	0	1	6	33	4,80
	%	0	0	2,5	15,0	82,5	
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	F	0	0	2	7	31	4,73
	%	0	0	5,0	17,5	77,5	
Penyusunan penerapan kebijakan diklat	F	0	0	1	15	24	4,58
	%	0	0	2,5	37,5	60,0	

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 6 menunjukkan bahwa indikator yang dominan dalam membentuk variabel lingkungan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah indikator pimpinan yang kondusif dalam mengatasi masalah dengan nilai rata-rata 4,80, kemudian disusul indikator pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dengan nilai rata-rata 4,73, dan indikator penegakan integritas dan nilai etika dengan nilai rata-rata 4,70. Sedangkan indikator penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel lingkungan pengendalian, sehingga indikator tersebut perlu diefektifkan dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

3. Variabel penilaian risiko (X_2)

Penilaian risiko adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Indikator yang digunakan adalah: (a) Keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah; (b) Kelengkapan semua transaksi

dan akun dalam laporan keuangan; (c) Penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan; dan (d) Penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan.

Adapun distribusi frekuensi tanggapan responden tentang variabel penilaian risiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Deskripsi variabel penilaian risiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

Indikator	Jawaban Responden						Mean
	Ket.	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	
Keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah	F	0	0	0	15	25	4,63
	%	0	0	0	37,5	62,5	
Kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan	F	0	0	0	10	30	4,75
	%	0	0	0	25,0	75,0	
Penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan	F	0	0	0	14	26	4,65
	%	0	0	0	35,0	65,0	
Penyajian/pengungkapan komponen dalam laporan keuangan	F	0	0	0	18	22	4,55
	%	0	0	0	45,0	55,0	

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 7 menunjukkan indikator yang dominan dalam membentuk variabel penilaian risiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah indikator Kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan dengan rata-rata nilai skor 4,75, kemudian disusul indikator penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan dengan nilai rata-rata skor 4,65, dan indikator keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah dengan nilai rata-rata skor 4,63. Sedangkan indikator penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan dengan nilai rata-rata 3,55

memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel penilaian risiko, sehingga indikator tersebut perlu diefektifkan dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

4. Variabel kegiatan pengendalian (X_3)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan.. Indikator yang digunakan adalah: (a) prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi; (b) pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi; (c) perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi; dan (d) Pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi. Keempat indikator tersebut sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan guna mencapai suatu tujuan organisasi yang lebih optimal, efektif, efisien dan ekonomis.

Adapun distribusi frekuensi tanggapan responden tentang variabel kegiatan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Deskripsi variabel kegiatan pendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.

Indikator	Jawaban Responden						Mean
	Ket.	ST S (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	
prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi	F	0	0	4	12	24	4,50
	%	0	0	10,0	30,0	60,0	
pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi	F	0	0	2	15	23	4,53
	%	0	0	5,0	37,5	57,5	
Perencanaan/penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi	F	0	0	6	11	23	4,43
	%	0	0	15,0	27,5	57,5	
Pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan	F	0	0	4	13	23	4,48
	%	0	0	10,0	32,5	57,5	

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 8 menunjukkan indikator yang dominan dalam membentuk variabel kegiatan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah indikator pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi dengan nilai rata-rata skor 4,53, kemudian disusul indikator prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dengan nilai rata-rata skor 4,50, dan indikator pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi dengan nilai rata-rata skor 4,48. Sedangkan indikator perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi dengan nilai rata-rata skor 4,43 memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel kegiatan pengendalian, sehingga indikator tersebut perlu diefektifkan perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi. Meskipun demikian, kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan variabel kegiatan

pengendalian memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

5. Variabel Informasi & komunikasi (X₄)

Informasi & komunikasi adalah suatu bentuk informasi komunikasi yang diperlukan setiap entitas untuk melaksanakan tanggungjawab dalam pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Indikator yang digunakan adalah: (a) Organisasi menghasilkan informasi berkualitas; (b) Organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern; (c) Organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung pengendalian intern; dan (d) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus.

Adapun distribusi frekuensi informasi & komunikasi responden tentang variabel komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Deskripsi Variabel Informasi/Komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

Indikator	Jawaban Responden						Mean
	Ket.	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	
menghasilkan informasi berkualitas	F	0	0	1	16	23	4,55
	%	0	0	2,5	40,0	57,5	
menggunakan informasi yang relevan	F	0	0	1	12	27	4,65
	%	0	0	2,5	30,0	67,5	
mengkomunikasikan informasi secara tepat	F	0	0	4	11	25	4,53
	%	0	0	10,0	27,5	62,5	
berkomunikasi pihak eksternal terus menerus	F	0	0	4	13	23	4,48
	%	0	0	10,0	32,5	57,5	

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 9 menunjukkan bahwa indikator yang dominan dalam membentuk variabel informasi & komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah indikator organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern dengan nilai rata-rata skor 4,65, kemudian disusul indikator organisasi menghasilkan informasi berkualitas dengan nilai rata-rata skor 4,55, dan indikator organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung pengendalian intern dengan nilai rata-rata skor 4,53. Sedangkan indikator organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus dengan nilai rata-rata skor 4,48 memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel informasi & komunikasi, sehingga indikator tersebut perlu diefektifkan. Meskipun demikian, kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan variabel informasi dan komunikasi memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

6. Variabel pemantauan (X_5)

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Indikator yang digunakan adalah: (1) Frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern; (2) Fungsi internal audit; (3) Saran dari akuntan; dan (4) Rekonsiliasi laporan secara periodik.

Adapun distribusi frekuensi tanggapan responden tentang variabel pemantauan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Deskripsi variabel pemantauan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

Indikator	Jawaban Responden						Mean
	Ket.	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	
Frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern	F	0	0	0	11	29	4,73
	%	0	0	0	27,5	72,5	
Fungsi internal audit	F	0	0	2	6	32	4,75
	%	0	0	5,0	15,0	80,0	
Saran dari akuntan	F	0	0	2	11	27	4,63
	%	0	0	5,0	27,5	67,5	
Rekonsiliasi laporan secara periodik	F	0	0	0	7	33	4,83
	%	0	0	0	17,5	82,5	

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

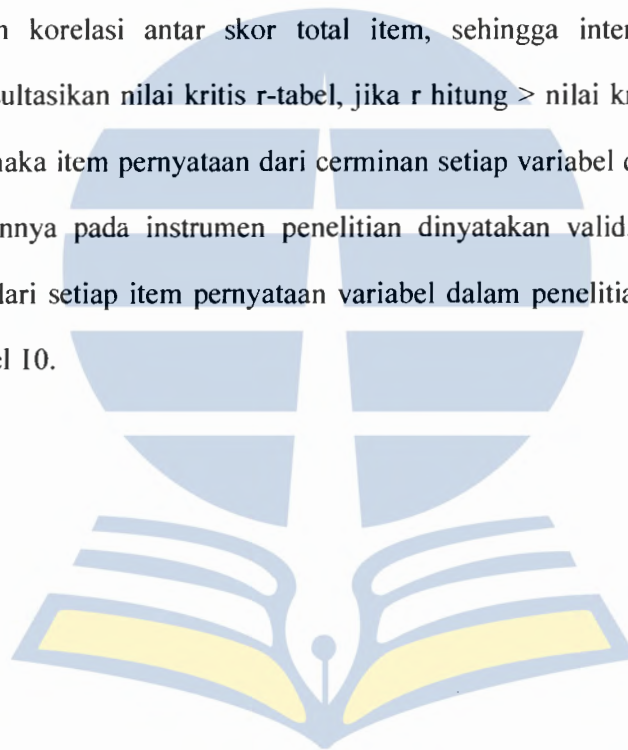
Tabel 10 menunjukkan bahwa indikator yang dominan dalam membentuk variabel pemantauan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah indikator rekonsiliasi laporan secara periodik dengan nilai rata-rata skor 4,83, kemudian disusul indikator fungsi internal audit dengan nilai rata-rata skor 4,75, dan indikator frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern dengan nilai rata-rata skor 4,73. Sedangkan indikator saran dari akuntan dengan nilai rata-rata skor 4,63 memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel pemantauan, sehingga indikator tersebut perlu diefektifkan agar mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Meskipun demikian, kecenderungan dari data mengindikasikan variabel pemantauan pengendalian memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

7. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total dari masing-masing atribut. Uji validitas digunakan untuk melihat ketepatan dan kecermatan dari sebuah instrumen penelitian dalam fungsi ukurnya mengukur item-item pernyataan yang dibuat. Item pernyataan yang memiliki korelasi positif tinggi dapat dianggap memiliki validitas yang tinggi pula.

Menurut Sugiyono (2004:233), *corrected item total correlation* merupakan korelasi antar skor total item, sehingga interpretasinya dengan mengkonsultasikan nilai kritis r-tabel, jika r hitung > nilai kritis r-tabel *product moment* maka item pernyataan dari cerminan setiap variabel dalam penelitian ini keberadaannya pada instrumen penelitian dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas dari setiap item pernyataan variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel I0.



Tabel 11. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	Corrected Item Total Correlation	r-Product Moment (r-tabel) (n = 40; α 0,05)	Keterangan
Laporan keuangan pemerintah (Y)	1	0,670	0,312	Valid
	2	0,795	0,312	Valid
	3	0,777	0,312	Valid
	4	0,865	0,312	Valid
Lingkungan pengendalian (X ₁)	1	0,665	0,312	Valid
	2	0,717	0,312	Valid
	3	0,730	0,312	Valid
	4	0,748	0,312	Valid
Penilaian risiko (X ₂)	1	0,788	0,312	Valid
	2	0,751	0,312	Valid
	3	0,834	0,312	Valid
	4	0,525	0,312	Valid
Kegiatan pengendalian (X ₃)	1	0,797	0,312	Valid
	2	0,801	0,312	Valid
	3	0,906	0,312	Valid
	4	0,850	0,312	Valid
Komunikasi (X ₄)	1	0,734	0,312	Valid
	2	0,805	0,312	Valid
	3	0,786	0,312	Valid
	4	0,838	0,312	Valid
Pemantauan pengendalian (X ₅)	1	0,628	0,312	Valid
	2	0,670	0,312	Valid
	3	0,642	0,312	Valid
	4	0,601	0,312	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan data yang diperoleh dari Hasil uji validitas instrumen laporan keuangan pemerintah diperoleh nilai *Corrected Item Total Correlation* (r hitung) antara 0,670 – 0,865 atau r hitung > r tabel 0,312, yang berarti setiap butir

pernyataan dari variabel laporan keuangan pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih).

Hasil uji validitas instrumen lingkungan pengendalian diperoleh nilai *Corrected Item Total Correlation* (r hitung) antara 0,665 – 0,748 atau r hitung $>$ r tabel 0,312. Hal ini berarti setiap butir pernyataan dari variabel lingkungan pengendalian yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih).

Hasil uji validitas instrumen penilaian risiko diperoleh nilai *Corrected Item Total Correlation* (r hitung) antara 0,625 – 0,834 atau r hitung $>$ r tabel 0,312. Hal ini berarti setiap butir pernyataan dari variabel penilaian risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih).

Hasil uji validitas instrumen kegiatan pengendalian diperoleh nilai *Corrected Item Total Correlation* (r hitung) antara 0,797 – 0,906 atau r hitung $>$ r tabel 0,312. Hal ini berarti setiap butir pernyataan dari variabel kegiatan pengendalian yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih).

Hasil uji validitas instrumen informasi & komunikasi diperoleh nilai *Corrected Item Total Correlation* (r hitung) antara 0,734 – 0,838 atau r hitung $>$ r tabel 0,312. Hal ini berarti setiap butir pernyataan dari variabel informasi & komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih).

Hasil uji validitas instrumen pemantauan pengendalian diperoleh nilai *Corrected Item Total Correlation* (r hitung) antara 0,601 – 0,670 atau r hitung $>$ r tabel 0,312. Hal ini berarti setiap butir pernyataan dari variabel pemantauan pengendalian yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (sahih).

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi jawaban. Pengujian reliabilitas (tingkat lingkungan pengendalian) dari suatu variabel dapat dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*, dimana item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai *Cronbach Alpha* > nilai kritis r-tabel *Product Moment* pada tingkat kepercayaan 95 %. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa item pernyataan dari cerminan setiap variabel dalam penelitian ini keberadaannya pada instrumen penelitian dinyatakan reliabel (handal).

Nilai *Cronbach Alpha* dari keseluruhan item pernyataan dalam instrumen variabel penelitian diperoleh sebesar 0,970 (Lampiran 5). Nilai ini memberikan makna bahwa tingkat konsistensi (keandalan) dari instrumen penelitian yang digunakan adalah sebesar 97%. Artinya apabila kuesioner dalam penelitian ini akan digunakan secara berulang-ulang pada populasi akan memberikan nilai objektivitas, stabilitas, akurasi dan konsistensi tinggi dalam fungsi ukurnya setelah diterapkan.

Adapun uji *reliabilitas* dari setiap variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	<i>r-Product Moment</i> (r-tabel) (n = 40; α 0,05)	Keterangan
Laporan keuangan pemerintah (Y)	1	0,969	0,312	Reliabel
	2	0,968	0,312	Reliabel
	3	0,968	0,312	Reliabel
	4	0,967	0,312	Reliabel
Lingkungan pengendalian (X ₁)	1	0,969	0,312	Reliabel
	2	0,969	0,312	Reliabel
	3	0,969	0,312	Reliabel
	4	0,968	0,312	Reliabel
Penilaian risiko (X ₂)	1	0,968	0,312	Reliabel
	2	0,969	0,312	Reliabel
	3	0,968	0,312	Reliabel
	4	0,970	0,312	Reliabel
Kegiatan pengendalian (X ₃)	1	0,968	0,312	Reliabel
	2	0,968	0,312	Reliabel
	3	0,967	0,312	Reliabel
	4	0,968	0,312	Reliabel
Komunikasi (X ₄)	1	0,969	0,312	Reliabel
	2	0,968	0,312	Reliabel
	3	0,968	0,312	Reliabel
	4	0,968	0,312	Reliabel
Pemantauan (X ₅)	1	0,969	0,312	Reliabel
	2	0,969	0,312	Reliabel
	3	0,969	0,312	Reliabel
	4	0,970	0,312	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas instrumen dari variabel laporan keuangan pemerintah diperoleh nilai *Cronbach*

Alpha (r hitung) antara 0,967 – 0,969 atau r hitung $>$ r tabel 0,312, yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel laporan keuangan pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel (handal). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam fungsi ukurnya tidak menimbulkan arti ganda sehingga terjamin konsistensinya dalam mengukur laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Hasil uji reliabilitas instrumen dari variabel lingkungan pengendalian diperoleh nilai *Cronbach Alpha* (r hitung) antara 0,968 – 0,969 atau r hitung $>$ r tabel 0,312, yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel lingkungan pengendalian yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel (handal). Dengan demikian, dapat dikatakan instrumen penelitian yang digunakan dalam fungsi ukurnya tidak menimbulkan arti ganda sehingga terjamin konsistensinya dalam mengukur pengaruh variabel lingkungan pengendalian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Hasil uji reliabilitas instrumen dari variabel penilaian risiko diperoleh nilai *Cronbach Alpha* (r hitung) antara 0,968 – 0,970 atau r hitung $>$ r tabel 0,312, yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel penilaian risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel (handal). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam fungsi ukurnya tidak menimbulkan arti ganda sehingga terjamin konsistensinya dalam mengukur pengaruh variabel penilaian risiko terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Hasil uji reliabilitas instrumen dari variabel kegiatan pengendalian diperoleh nilai *Cronbach Alpha* (r hitung) antara 0,967 – 0,968 atau r hitung $>$ r

tabel 0,312, yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel kegiatan pengendalian yang digunakan dalam penelitian ini adalah handal. Dengan demikian, dapat dikatakan instrumen penelitian yang digunakan dalam fungsi ukurnya tidak menimbulkan arti ganda sehingga terjamin konsistensinya dalam mengukur pengaruh variabel kegiatan pengendalian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Hasil uji reliabilitas instrumen dari variabel informasi & komunikasi diperoleh nilai *Cronbach Alpha* (*r* hitung) antara 0,968 – 0,969 atau r hitung $>$ r tabel 0,312, yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel informasi & komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah handal. Dengan demikian, dapat dikatakan instrumen penelitian yang digunakan dalam fungsi ukurnya tidak menimbulkan arti ganda sehingga terjamin konsistensinya dalam mengukur pengaruh variabel informasi & komunikasi terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

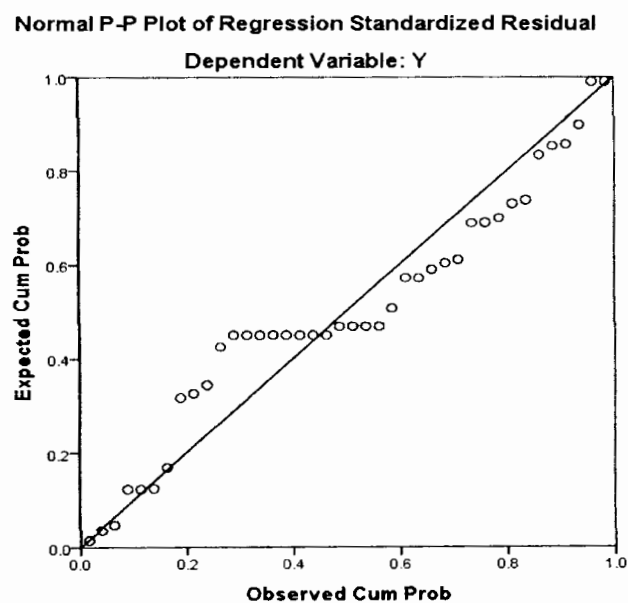
Hasil uji reliabilitas instrumen variabel pemantauan diperoleh nilai *Cronbach Alpha* (*r* hitung) antara 0,969 – 0,970 atau r hitung $>$ r tabel 0,312, yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel pemantauan yang digunakan adalah handal. Dengan demikian, dapat dikatakan instrumen penelitian yang digunakan dalam fungsi ukurnya tidak menimbulkan arti ganda sehingga terjamin konsistensinya dalam mengukur pengaruh variabel pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

8. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, maka terlebih dahulu melakukan uji normalitas untuk melihat apakah model regresi yang digunakan memiliki residual yang terdistribusi secara normal atau tidak. Apabila didapatkan residual yang tidak tersebar secara normal pada suatu regresi, maka akan menghasilkan regresi yang tidak baik atau tidak konsisten dan efisien.

Hasil pengujian grafis normalitas dalam penelitian ini menunjukkan sebaran titik pada grafis normalitas berada sepanjang garis diagonal. Hal ini berarti model regresi penelitian ini telah memenuhi syarat asumsi kenormalan dari data sehingga diharapkan hasilnya akan baik atau sesuai dengan asumsi klasik dari suatu regresi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

b. Uji Multikolinearitas

Keberadaan multikolinearitas dalam suatu regresi akan mengganggu hasil regresi penelitian, sehingga tidak menghasilkan parameter yang efisien dan efektif yang akan membuat kesalahan dalam parameter yang dihasilkan. Regresi dikatakan baik jika suatu regresi tidak memiliki multikolinearitas di dalamnya sehingga tidak ada gangguan yang diharapkan akan terjadi pada regresi. Keberadaan multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) atau nilai toleransinya, yakni apabila nilai $VIF < 10$ atau secara kebalikannya dengan melihat nilai toleransinya $> 0,1$.

Adapun hasil perhitungan nilai VIF atau toleransi yang dilakukan untuk regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics^a			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	X1	0,221	4,529
	X2	0,244	4,101
	X3	0,233	4,285
	X4	0,248	4,037
	X5	0,455	2,198

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai toleransinya $> 0,1$. Ini menunjukkan bahwa indikasi keberadaan multikolinearitas pada persamaan yang dilakukan ternyata tidak terbukti atau dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas

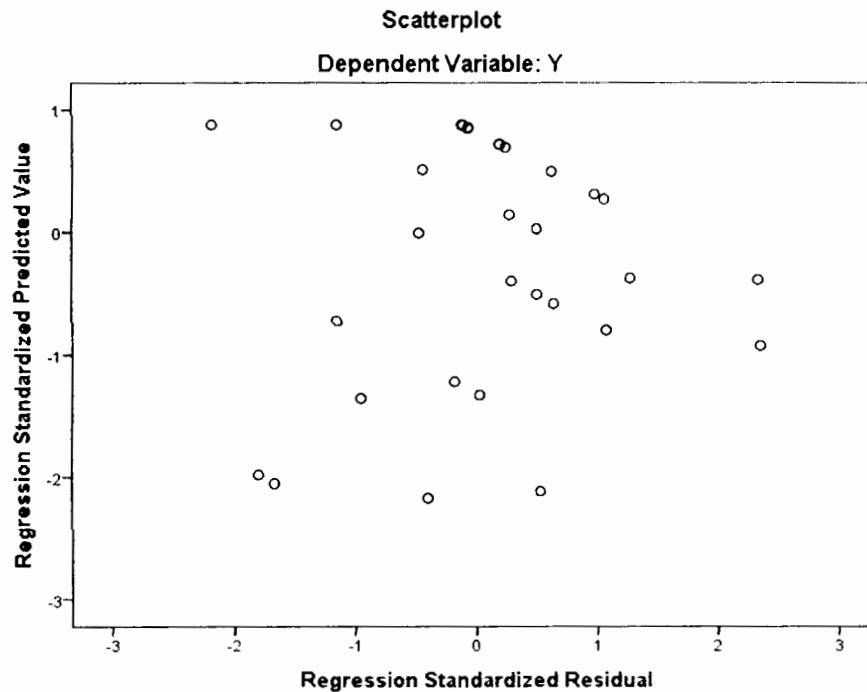
dalam persamaan yang dilakukan atau hubungan yang terjadi antar variabel bebas dapat ditoleransi sehingga tidak akan mengganggu hasil regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pengambilan sampel dilakukan dengan benar pada populasi yang tepat atau dengan perkataan lain apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual regresi. Suatu model regresi yang mengandung heterokedastisitas akan menghasilkan parameter yang bias yang akan menyebabkan kesalahan dalam perlakuan. Suatu model regresi yang baik apabila di dalamnya tidak diperoleh heterokedastisitas melainkan homokedastisitas.

Uji heterokedastisitas dapat diketahui dengan melihat plot grafik atau hubungan antara variabel terikat dengan nilai residualnya. Heterokedastisitas akan muncul apabila terdapat pola tertentu antar keduanya seperti bergelombang dan kontinyu atau menyempit atau melebar teratur, sedangkan homokedastisitas akan muncul apabila tidak diperoleh pola yang jelas atau titik-titik yang diperoleh menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Hasil pengujian asumsi klasik dalam hal ini uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah garis nol secara acak. Hal ini berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya heterokedastisitas, melainkan homokedastisitas sehingga penelitian ini tidak menghasilkan parameter bias yang menyebabkan kesalahan dalam perlakuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

9. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolenaritas, dan uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa regresi berganda yang diestimasi telah memenuhi syarat asumsi-asumsi klasik sehingga diharapkan hasil akan baik dalam menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Pengujian terhadap hasil regresi yang diperoleh dilakukan dengan pengujian secara simultan dengan menggunakan uji-F dan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

a. Pengujian Hipotesis secara Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh secara individu variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hasil pengujiannya dapat dilihat melalui nilai t-hitungnya. Adapun hasil pengujian secara parsial (t-hitung) dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.062	.558		.111	.912
	X1	.027	.194	.022	.141	.889
	X2	.045	.196	.035	.231	.818
	X3	.344	.127	.416	2.706	.011
	X4	.297	.144	.308	2.064	.047
	X5	.280	.134	.230	2.086	.045

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan pengujian secara parsial seperti pada Tabel 14 menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan secara individu berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, sedangkan variabel lingkungan pengendalian, dan penilaian risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah. Adanya pengaruh signifikan dapat diketahui dari nilai t-hitung > t-tabel yakni 2,042 diperoleh dari ($df_2 = 34$; $\alpha = 0,05$) dan juga dapat diketahui melalui tingkat signifikansinya dimana pada kolom sig./probabilitas pada tabel di

atas diperoleh nilai signifikansi $< 0,05$, yakni: variabel kegiatan pengendalian dengan t-hitung $2,706 > 2,042$ atau signifikansi $0,011 < 0,05$ (berpengaruh signifikan), variabel informasi & komunikasi dengan t-hitung $2,064 > 2,042$ atau signifikansi $0,047 < 0,05$ (berpengaruh signifikan), dan variabel pemantauan dengan t-hitung $2,086 > 2,042$ atau signifikansi $0,045 < 0,05$ (berpengaruh signifikan). Selanjutnya pengaruh tidak signifikan dapat diketahui dari nilai t-hitung $< t$ -tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$, yakni: variabel lingkungan pengendalian dengan t-hitung $0,141 < 2,042$ atau signifikansi $0,889 > 0,05$ (berpengaruh tidak signifikan), dan variabel penilaian risiko dengan t-hitung $0,231 < 2,042$ atau signifikansi $0,818 > 0,05$ (berpengaruh tidak signifikan).

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat pula diketahui hasil persamaan regresi linier berganda dari model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = 0,062 + 0,027 X_1 + 0,045 X_2 + 0,344 X_3 + 0,297 X_4 + 0,280 X_5$$

Selanjutnya, hubungan fungsional variabel bebas X_i dan variabel terikat Y dilihat dari koefisien *standardized beta*, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Z_Y = 0,022 X_1 + 0,035 X_2 + 0,416 X_3 + 0,308 X_4 + 0,230 X_5$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut di atas, maka dapat diinterpretasi sebagai berikut:

- a. Konstanta (b_0) = 0,062, yang menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan, maka laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga bisa diartikan tetap dilaporkan adalah 0,062.

- b. $b_1 = 0,027$, yang menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini berarti lingkungan pengendalian belum mampu mendukung peningkatan secara signifikan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, karena angka beta atau *standardized coefficient* yang diperoleh hanya sebesar yaitu 0,022 atau 2,2 persen.
- c. $b_2 = 0,027$, yang menunjukkan bahwa penilaian risiko berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini berarti penilaian risiko belum mampu mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga secara signifikan, karena angka beta atau *standardized coefficient* yang diperoleh hanya sebesar yaitu 0,027 atau 2,7 persen.
- d. $b_3 = 0,344$, yang menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini berarti semakin baik kegiatan pengendalian, maka laporan keuangan pemerintah juga akan semakin baik. Besarnya pengaruh variabel kegiatan pengendalian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga dapat diketahui melalui angka beta atau *standardized coefficient* yaitu 0,416 atau 41,6 persen.
- e. $b_4 = 0,258$, yang menunjukkan bahwa informasi & komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini berarti semakin efektif informasi & komunikasi dalam sistem pengendalian intern, maka laporan keuangan pemerintah juga akan semakin baik. Besarnya pengaruh variabel informasi & komunikasi terhadap laporan

keuangan pemerintah Kabupaten Nduga dapat diketahui melalui angka beta atau *standardized coefficient* yaitu 0,308 atau 30,8 persen.

- f. $b_5 = 0,280$, yang menunjukkan bahwa pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini berarti semakin baik pemantauan dalam sistem pengendalian intern, maka laporan keuangan pemerintah juga akan cenderung baik. Besarnya pengaruh variabel pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah dapat diketahui melalui angka beta atau *standardized coefficient* yaitu 0,230 atau 23 persen.

b. Pengujian Hipotesis secara Simultan

Pengujian secara simultan bertujuan untuk melihat pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan pengendalian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga dengan melihat nilai F-hitungnya. Adapun hasil pengujian secara uji model, dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Pengujian Secara uji model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.631	5	1.726	29.457	.000 ^b
	Residual	1.992	34	.059		
	Total	10.623	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3

Sumber: Hasil Analisis Data, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh adalah 29,457, sedangkan F-tabel ($df_1=5$; $df_2=34$; $\alpha 0,05$) diperoleh 2,49 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian, nilai F-hitung > F-tabel atau 29,46, > 2,49, yang berarti berpengaruh signifikan pada tingkat alpha yang sangat

kecil (0%). Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, maka digunakan koefisien determinasi (R^2). Adapun perolehan nilai R^2 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.812	.785	.24208

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Analisis Data, 2015

Berdasarkan hasil pengujian determinasi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0,812. Angka koefisien determinasi ini menyatakan besarnya kontribusi variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga adalah 81,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 18,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel bebas yang berpengaruh signifikan tersebut, ternyata variabel kegiatan pengendalian yang mempunyai pengaruh dominan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, karena diperoleh nilai beta atau *standardized coefficient* yang lebih besar dari variabel bebas lainnya yang berpengaruh signifikan tersebut.

C. Pembahasan

Hasil pembahasan mengenai pengaruh variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap laporan keuangan pemerintah

Hasil analisis uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini berarti kegiatan pengendalian belum mampu mendukung laporan keuangan pemerintah secara signifikan. Oleh karena itu, lingkungan pengendalian perlu mendapat perhatian khusus oleh pihak pengambil kebijakan untuk lebih ditingkatkan guna mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Adanya pengaruh tidak signifikan dari lingkungan pengendalian disebabkan oleh masih rendahnya peran indikator yang membentuk variabel lingkungan pengendalian. Indikator tersebut meliputi: (a) penegakan integritas & nilai etika; (b) pimpinan yang kondusif dalam mengatasi masalah; (c)

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; dan (d) Penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai. Keempat indikator dari variabel lingkungan pengendalian tersebut, baik uji validitas maupun reliabilitas menunjukkan nilai r -hitung $>$ r tabel yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel lingkungan pengendalian yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Indikator yang dominan dalam membentuk variabel lingkungan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah indikator pimpinan yang kondusif dalam mengatasi masalah dengan nilai rata-rata 4,80, kemudian disusul indikator pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dengan nilai rata-rata 4,73, dan indikator penegakan integritas dan nilai etika dengan nilai rata-rata 4,70. Sedangkan indikator penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel lingkungan pengendalian. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait dengan keempat indikator tersebut diperhatikan untuk diberdayakan secara maksimal agar variabel lingkungan pengendalian memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan pengendalian sebagai salah satu faktor yang menentukan sistem pengendalian intern, namun variabel lingkungan pengendalian dalam penelitian belum mampu mendukung laporan keuangan pemerintah secara signifikan. Oleh karena itu, variabel lingkungan pengendalian perlu mendapat perhatian khusus

untuk diprioritaskan dan diefektifkan dengan memberdayakan indikator yang membentuknya secara maksimal agar dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Temuan teori yang dihasilkan dari penelitian ini adalah variabel lingkungan pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurnasingsih (2010), lingkungan pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah.

2. Pengaruh penilaian risiko terhadap laporan keuangan pemerintah

Hasil analisis uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa penilaian risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini berarti penilaian risiko belum mampu mendukung laporan keuangan pemerintah secara signifikan. Oleh karena itu, penilaian risiko perlu mendapat perhatian khusus oleh pihak pengambil kebijakan untuk lebih ditingkatkan guna mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Adanya pengaruh tidak signifikan dari penilaian risiko disebabkan oleh masih rendahnya peran indikator yang membentuk variabel penilaian risiko. Indikator tersebut meliputi: (a) Keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah; (b) Kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan; (c) Penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan; dan (d) Penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan. Keempat indikator dari variabel penilaian risiko, baik uji validitas maupun reliabilitas menunjukkan nilai r -hitung $>$ r tabel yang berarti setiap butir pernyataan dari

variabel penilaian risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Indikator yang dominan dalam membentuk variabel penilaian risiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah indikator kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan dengan rata-rata nilai skor 4,75, kemudian disusul indikator penilaian dan alokasi angka-angka dalam laporan keuangan dengan nilai rata-rata skor 4,65, dan indikator keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah dengan nilai rata-rata skor 4,63. Sedangkan indikator penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan dengan nilai rata-rata 3,55 memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel penilaian risiko, sehingga indikator tersebut perlu diefektifkan dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait dengan keempat indikator tersebut perlu diperhatikan untuk diberdayakan secara maksimal agar variabel penilaian risiko memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penilaian risiko sebagai salah satu faktor yang menentukan sistem pengendalian intern, namun variabel penilaian risiko dalam penelitian belum mampu mendukung laporan keuangan pemerintah secara signifikan. Oleh karena itu, variabel penilaian risiko perlu mendapat perhatian khusus untuk diprioritaskan dan diefektifkan dengan memberdayakan indikator yang membentuknya secara

maksimal agar dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Temuan teori yang dihasilkan dari penelitian ini adalah variabel penilaian risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (2010), penilaian risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurnasingsih (2010), bahwa penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah.

3. Pengaruh kegiatan pengendalian terhadap laporan keuangan pemerintah

Hasil uji-t atau secara parsial (individu) menunjukkan bahwa variabel kegiatan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan searah antara kegiatan pengendalian dengan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, dalam arti semakin efektif penilaian risiko maka laporan keuangan pemerintah juga akan semakin baik.

Variabel kegiatan pengendalian memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah dan menempati urutan pertama dari variabel bebas yang berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, variabel kegiatan pengendalian merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, sehingga perlu terus dikembangkan dan dimaksimalkan terutama pada indikator-indikator yang membentuknya guna mendukung laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Pengaruh variabel kegiatan pengendalian terhadap laporan keuangan pemerintah sangat ditentukan oleh peran indikator yang digunakan, yaitu: (a) prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi; (b) pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi; (c) perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi; dan (d) Pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi. Keempat indikator dari variabel penilaian risiko, baik uji validitas maupun reliabilitas menunjukkan nilai r -hitung $>$ r tabel yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel kegiatan pengendalian yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, sehingga diharapkan dapat mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Sehubungan dengan keempat indikator tersebut, maka indikator yang dominan dalam membentuk variabel kegiatan pengendalian adalah indikator pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi dengan nilai rata-rata skor 4,53, kemudian disusul indikator prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dengan nilai rata-rata skor 4,50, dan indikator pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi dengan nilai rata-rata skor 4,48. Sedangkan indikator perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan setiap transaksi dengan nilai rata-rata skor 4,43 memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel kegiatan pengendalian, sehingga indikator tersebut perlu diefektifkan guna mendukung laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Meskipun demikian, kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan variabel kegiatan pengendalian memberikan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kegiatan pengendalian merupakan salah faktor penting yang sangat menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga dan pengaruhnya menempati urutan pertama atau dominan, sehingga perlu dipertahankan kebijakan yang terkait dengan kegiatan pengendalian dalam sistem pengendalian intern, namun indikator yang memberikan nilai rata-rata relatif rendah perlu ditingkatkan lagi agar kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga dapat ditingkatkan dan minimal dapat dipertahankan di masa akan datang.

Temuan teori yang dihasilkan dari penelitian ini adalah variabel kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurnasingsih (2010), dan Syamsuddin (2010), membuktikan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh dominan terhadap laporan keuangan pemerintah.

4. Pengaruh informasi & komunikasi terhadap laporan keuangan pemerintah

Hasil uji-t atau secara parsial (individu) menunjukkan bahwa variabel informasi & komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan searah antara variabel informasi & komunikasi dengan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, dalam arti semakin efektif informasi & komunikasi maka laporan keuangan pemerintah juga akan semakin baik.

Variabel informasi & komunikasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah dan menempati urutan kedua dari variabel bebas yang berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, variabel

informasi & komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, sehingga perlu terus dikembangkan dan dimaksimalkan terutama pada indikator-indikator yang membentuknya guna mendukung laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Pengaruh variabel informasi & komunikasi terhadap laporan keuangan pemerintah sangat ditentukan oleh peran indikator yang digunakan, yaitu: (a) Organisasi menghasilkan informasi berkualitas; (b) Organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern; (c) Organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung pengendalian intern; dan (d) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus. Keempat indikator dari variabel informasi & komunikasi, baik uji validitas maupun reliabilitas menunjukkan nilai r -hitung $>$ r tabel yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel informasi & komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, sehingga diharapkan dapat mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Indikator yang dominan dalam membentuk variabel informasi & komunikasi adalah indikator organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern dengan nilai rata-rata skor 4,65, kemudian disusul indikator organisasi menghasilkan informasi berkualitas dengan nilai rata-rata skor 4,55, dan indikator organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung pengendalian intern dengan nilai rata-rata skor 4,53. Sedangkan indikator organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus dengan nilai rata-rata skor 4,48 memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel informasi & komunikasi, sehingga

indikator tersebut perlu diefektifkan. Meskipun demikian, kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan variabel informasi & komunikasi mampu mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel informasi & komunikasi merupakan salah faktor penting yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga dan pengaruhnya menempati urutan kedua, sehingga perlu ditingkatkan lagi agar mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga di masa akan datang.

Temuan teori yang dihasilkan dari penelitian ini adalah variabel informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (2010) yang membuktikan bahwa informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah.

5. Pengaruh pemantauan pengendalian terhadap laporan keuangan pemerintah

Hasil analisis uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa variabel pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara variabel pemantauan dengan laporan keuangan pemerintah, dalam arti semakin efektif pemantauan maka laporan keuangan pemerintah juga akan semakin baik.

Variabel pemantauan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah dan menempati urutan ketiga dari variabel bebas yang berpengaruh signifikan tersebut. Karena itu, variabel pemantauan merupakan salah faktor penting yang sangat menentukan tingkat laporan

keuangan pemerintah, sehingga perlu dipertahankan kebijakan yang terkait dengan pemantauan pengendalian dalam pelayanan, namun indikator yang memberikan nilai rata-rata relatif rendah perlu ditingkatkan lagi agar laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan dan minimal dapat dipertahankan di masa akan datang.

Adanya pengaruh variabel pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintah sangat ditentukan oleh keempat indikator yang membentuknya. Indikator tersebut, meliputi: (1) Frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern; (2) Fungsi internal audit; (3) Saran dari akuntan; dan (4) Rekonsiliasi laporan secara periodik. Keempat indikator dari variabel pemantauan, baik uji validitas maupun reliabilitas menunjukkan nilai r -hitung $>$ r tabel yang berarti setiap butir pernyataan dari variabel pemantauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, sehingga diharapkan dapat mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga

Indikator yang dominan dalam membentuk variabel pemantauan pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah indikator rekonsiliasi laporan secara periodik dengan nilai rata-rata skor 4,83, kemudian disusul indikator fungsi internal audit dengan nilai rata-rata skor 4,75, dan indikator frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern dengan nilai rata-rata skor 4,73. Sedangkan indikator saran dari akuntan dengan nilai rata-rata skor 4,63 memberikan proporsi terkecil dalam membentuk pemantauan, sehingga indikator tersebut perlu diefektifkan agar mampu mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemantauan merupakan salah faktor penting yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga dan pengaruhnya menempati urutan ketiga, sehingga perlu ditingkatkan lagi agar mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga di masa akan datang.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Selanjutnya hasil pengujian secara parsial (individu) menunjukkan variabel kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, sedangkan variabel lingkungan pengendalian, dan penilaian risiko berpengaruh tidak signifikan. Dari ketiga variabel bebas yang berpengaruh signifikan tersebut ternyata variabel kegiatan pengendalian berpengaruh dominan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

Temuan teori yang dihasilkan dari penelitian ini adalah variabel pemantauan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurnasingsih (2010), yang membuktikan bahwa pemantauan (pengawasan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang ditunjukkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial (uji-t) menunjukkan bahwa:
 - a. Lingkungan pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
 - b. Penilaian resiko berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
 - c. Kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
 - d. Informasi & komunikasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
 - e. Pemantauan berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
- 2 Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang terdiri atas: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.
- 3 Dari keempat variabel bebas yang berpengaruh signifikan tersebut, ternyata variabel kegiatan pengendalian yang dominan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu mempertimbangkan aspek sistem pengendalian intern, yakni: kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan sebagai variabel yang berpengaruh signifikan, terutama dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, sedangkan lingkungan pengendalian, dan penilaian risiko masih perlu ditingkatkan secara maksimal agar dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah secara signifikan.
2. Variabel lingkungan pengendalian dan penilaian risiko yang memberikan pengaruh tidak signifikan, masih perlu dimaksimalkan terutama pada indikator yang membentuknya yakni: penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai, dan kelengkapan semua transaksi dan akun dalam laporan keuangan perlu dimaksimalkan guna mendukung peningkatan laporan keuangan pemerintah di masa akan datang.
3. Mengingat variabel kegiatan pengendalian memberikan pengaruh dominan sehingga perlu dipertahankan dan menjadi kebijakan utama dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga termasuk yang terkait dengan adanya pemisahan tugas dalam kegiatan pokok organisasi, prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi, dan pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, 2009, *Manajemen Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim, 2003, *Auditing 1 Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Anthony and Govindarajan, 2001, *Management Control System*, tenth edition, Mc Graw Hill, New York.
- Boynton, Johnson and Kell, 2001, *Modern Auditing*, seventh edition, Wiley and Sons Inc., New York.
- BPK – RI, 2012, *Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- BPK - RI Perwakilan Propinsi Papua di Jayapura.
- BPK – RI , 15- 12 2012 , *Bagan Alur Opini*, <http://siska.bpk.go.id/?=3532>
- Budiharto, Priyo, 2008. Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah. *Dialogue*, 5 (1). Pp. 1-20 ISSN 1693-8399 .Melalui <http://eprints.undip.ac.id/4682/>.
- COSO, 2013. *Internal Control-Integrated Framework: Executive Summary*, Durham, North Carolina, May 2013.
- Devas, Nick, 2001. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Indonesia Jakarta.
- Diharna, 2008. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Swagati Press. Yogyakarta.
- Fuadi, Arif, 2008. Pengaruh Pengawasan Prefentif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*: Vol. 1, No. 1 (2013).
- Fraser, Lynn M. dan Aileen orniston. 2008. *Memahami Laporan Keuangan*. Edisi Ketujuh. Indeks
- Hariadi, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2001 *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit*, edisi dua, BPFE, Yogyakarta.
- Hindriani, Nuning, 2012. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perencanaan dan Penyerapan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas*

- Kesehatan Kabupaten Madiun). Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Irena Liana, 2011, Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia terhadap Pemberian Opini oleh BPK. Tesis, Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Jusuf, dkk, 2003, Auditing Pendekatan Terpadu, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 2004. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
- M. Ikhan, dkk, 2010, Administrasi Keuangan Publik, UT, Jakarta.
- Moeller, Robert R., 2007. COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, edisi tiga, Salemba Empat, Jakarta.
- , (2002. Auditing, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2005. Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, Hadari, 2001, *Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nuning Hindriani, dkk (2012), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Jurnal Akuntansi: Vol. 1, 2012.
- Nurnasingsih, 2010. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai*. Tesis. PPs Unhas, Makassar.
- Siagian, Sondang, P., 2006, Manajemen Strategik, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinamo, Jansen H., 2010. Monitoring Sebagai Alat Kendali Kualitas SPIP. Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government, Vol. XVII/No. 2/Juni 2010. ISSN: 0854-0519.

- Subramanyam, K. R. dan John J. Wild. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kesepuluh. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2004. *Statistik untuk Penelitian*, Cetakan Kedua, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Soegiyono, 2010, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung.
- Sukardi, Dewa Ketut : 1988. *Penelitian Ilmiah*, Bina Mandiri, Jakarta.
- Suprpto, Bambang. 2006. Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol II, No.3. Denpasar.
- Susanto, Azhar, 2004. *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer, Lingga Jaya, Bandung*.
- Syamsuddin, 2010. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare*. Tesis. PPs Unhas, Makassar.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Alfabeta, Bandung.
- Tjakrawala, Kurniawan, 2003, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Buku Dua, Salemba Empat, Jakarta.
- Tugiman, Hiro, 2001, *Standar Profesional Audit Internal*, Edisi Kelima, Kanisius, Yogyakarta.
- Tugiman, Hiro, 2006, *Pengenalan Manajemen Internal Audit*, Yayasan Pendidikan Internal Auditor, Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2005. Struktur Pengendalian Intern. Rineka Cipta, Jakarta.*
- Umar, Husaini, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Usman, Husaini, 2006, *Pengantar Statistika*, Bumi Aksara, Yokyakarta.
- Utoyo, Bambang, 2011. Perkembangan Konsep Internal Control Versi COSO. *Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government*, Vol. XVIII/No. 4/Desember 2011. ISSN: 0854-0519, hal. 50-51.
- Wongso, Andre, 2010. Risk Assessment: Membangun Budaya Awareness. *Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government*, Vol. XVII/No. 2/Juni 2010. ISSN: 0854-0519, hal. 17

- Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi, 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia.
- , 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern*
- Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001*, Jakarta: Salemba.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, edisi satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Materi – Materi Rapat Koordinasi Pengawasan TK. Propinsi dan Pusat.
- Materi – Materi Rapat Koordinasi Pengawasan di Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

Lampiran 1. Angket Penelitian

KUESIONER PENELITIAN**IDENTITAS RESPONDEN:**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :

Instruksi:

Aspek-aspek penilaian variabel-variabel sistem pengendalian intern yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, pemantauan, dan pengaruhnya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga, dengan menggunakan Skala Likert, yaitu:

- (a) Sangat setuju (SS) = bobot 5
- (b) Setuju (S) = bobot 4
- (c) Cukup setuju (CS) = bobot 3
- (d) Tidak setuju (TS) = bobot 2
- (e) Sangat tidak setuju (STS) = bobot 1

Kuesioner ini mencakup 5 aspek penilaian variabel. Pilihlah salah satu alternatif dari lima alternatif yang tersedia (a,b,c, d dan e) dengan cara melingkarinya pada masing-masing aspek yang dinilai.

Bapak/Ibu/Sdr(i) diminta dengan hormat memberi penilaian dengan mengisi daftar kuesioner ini. Kerahasiaan dari Bapak/Ibu/Sdr(i) dari hasil penelitian ini akan dijamin dan hanya untuk kepentingan ilmiah dan akademis.

Semakin obyektif penilaian anda semakin valid hasil penilaian ini.

Peneliti

M. Tahir

PENILAIAN VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN

A. Variabel laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (CS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Laporan keuangan relevan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan.					
2.	Andal dalam menyajikan informasi yang jujur dalam keuangan daerah					
3.	Laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah					
4.	Pengguna dapat memahami informasi yang ditampung dalam laporan keuangan					

B. Variabel lingkungan pengendalian (X1)

No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (CS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Penegakan integritas & nilai etika dilakukan berdasarkan kode etik keprofesian pegawai.					
2.	Pimpinan kondusif dalam mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapi bawahan.					
3.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi pegawai.					
4.	Penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai terlaksana dengan baik.					

a. Variabel penilaian risiko (X2)

No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (CS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Penilaian kebenaran akan keberadaan atau keterjadian laporan keuangan pemerintah selama periode akuntansi terlaksana sesuai yang diharapkan.					
2.	Penilaian kelengkapan semua transaksi dan akun yang ada dalam laporan keuangan pemerintah terlaksana sesuai yang diharapkan					
3.	Penilaian dan alokasi penyajian laporan keuangan dengan angka-angka yang benar terlaksana sesuai yang diharapkan					
4.	Penyajian dan pengungkapan komponen dalam laporan keuangan terlaksana dengan baik.					

D. Variabel kegiatan pengendalian (X3)

No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (CS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Kegiatan pengendalian intern dilaksanakan sesuai prosedur otorisasi yang memadai.					
2.	Kegiatan pengendalian dengan adanya pemisahan tugas sudah terlaksana memadai sesuai yang diharapkan.					
3.	Kegiatan pengendalian dengan perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan terlaksana memadai.					
4.	Kegiatan pengendalian dengan Pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan terlaksana memadai.					

b. Variabel informasi & komunikasi (X₄)

No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (CS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Organisasi menghasilkan informasi berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian intern					
2.	Organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern.					
3.	Organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung pengendalian intern					
4.	Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus.					

D. Variabel Pemantauan (X₅)

No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (CS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Pemantauan terhadap frekuensi penilaian aktivitas pengendalian intern sesuai yang ditetapkan					
2.	Pemantauan pelaksanaan fungsi internal audit terlaksana dengan baik.					
3.	Pemantauan saran dari akuntan terlaksana dengan baik					
4.	Pemantauan rekonsiliasi laporan secara periodik terlaksana dengan baik.					

Terima kasih.

LAMPIRAN 2. TABULASI DATA HASIL PENELITIAN

No.	KARAKTERISTIK RESPONDEN				Laporan Keuangan Pemerintah (Y)					Lingkungan Pengendalian (X1)					Penilaian Resiko (X2)				
	J_kelamin	T_umur	T_perdidik	M_kerja	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
1	Laki-Laki	37	Diploma	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Perempuan	26	SLTA	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.75
3	Laki-Laki	48	S1	18	5	4	5	5	4.75	4	4	5	4	4.25	4	4	4	4	4
4	Laki-Laki	40	S1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Laki-Laki	38	Diploma	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.75
6	Laki-Laki	43	S1	17	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4.75	4	5	4	4	4.25
7	Perempuan	46	S1	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	Perempuan	32	SLTA	6	4	3	3	3	3.25	4	4	4	3	3.75	4	4	4	4	4
9	Laki-Laki	43	S1	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Laki-Laki	31	SLTA	4	5	4	5	4	4.5	4	5	5	4	4.5	4	5	4	4	4.25
11	Laki-Laki	36	Diploma	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Laki-Laki	41	SLTA	15	5	4	5	5	4.75	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4.75
13	Laki-Laki	26	Diploma	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.75
14	Perempuan	48	S1	18	4	4	3	4	3.75	4	3	3	4	3.5	4	4	4	4	4
15	Perempuan	32	S1	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	Laki-Laki	45	S1	18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.75
17	Laki-Laki	34	S1	9	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4.25	5	5	4	4	4.5
18	Laki-Laki	36	SLTA	13	4	4	4	3	3.75	4	4	3	4	3.75	4	4	4	4	4
19	Laki-Laki	39	SLTA	12	5	4	5	4	4.5	4	5	5	4	4.5	4	5	4	4	4.25
20	Perempuan	34	S1	6	5	4	5	4	4.5	4	5	5	4	4.5	4	5	5	5	4.75
21	Perempuan	40	S1	14	5	5	4	5	4.75	4	5	5	4	4.5	5	5	4	4	4.5
22	Laki-Laki	39	S1	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	Perempuan	31	SLTA	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Laki-Laki	41	S2	12	4	5	5	5	4.75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Laki-Laki	31	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Laki-Laki	40	SLTA	12	4	4	5	5	4.5	4	5	5	4	4.5	4	5	5	5	4.75
27	Laki-Laki	37	S1	13	5	4	5	5	4.75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	Laki-Laki	48	S1	20	4	4	3	3	3.5	5	5	4	5	4.75	4	4	4	4	4
29	Laki-Laki	38	S1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.75
30	Perempuan	40	S1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.75	5	5	5	5	5
31	Laki-Laki	27	SLTA	3	4	3	3	3	3.25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	Laki-Laki	39	S1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	Laki-Laki	40	S1	16	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4.75	4	5	5	5	4.75
34	Laki-Laki	27	Diploma	5	4	5	4	5	4.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	Laki-Laki	46	S1	20	4	5	4	5	4.5	5	5	5	4	4.75	5	5	5	5	5
36	Perempuan	27	Diploma	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	Laki-Laki	36	S1	9	5	5	4	5	4.75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	Laki-Laki	41	S1	15	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4.25	4	4	4	5	4.25
39	Perempuan	27	SLTA	3	4	5	5	5	4.75	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
40	Laki-Laki	45	S1	17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: Hasil Sebaran Angket Penelitian Tahun 2015

Kegiatan Pengendalian (X3)					Informasi/Komunikasi (X4)					Pemantauan (X5)				
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.75	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4.5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.75	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4.75
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4.25	5	5	4	5	4.75
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4.75	4	5	5	5	4.75	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	3.5	4	4	3	3	3.5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4.25	5	4	4	4	4.25	4	5	5	5	4.75
3	4	3	3	3.25	4	4	3	3	3.5	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4.25	4	4	4	5	4.25	5	5	4	5	4.75
4	5	4	5	4.5	4	5	5	4	4.5	5	5	4	5	4.75
5	4	4	4	4.25	4	5	4	4	4.25	4	5	5	5	4.75
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4.5	4	3	3	4	3.5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	4.75	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4.25	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4.75
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	4	3.5	4	4	3	3	3.5	4	3	3	4	3.5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4.25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	3.75	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	4.75	4	5	5	5	4.75	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4.5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	4	4	5	4	4.25	4	5	5	5	4.75
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4.75	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4.75	4	5	4	4	4.25

Lampiran 3. Analisis Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Frequency Table

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	29	72.5	72.5	72.5
	Perempuan	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Tingkat umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26	2	5.0	5.0	5.0
	27	4	10.0	10.0	15.0
	31	3	7.5	7.5	22.5
	32	2	5.0	5.0	27.5
	34	2	5.0	5.0	32.5
	36	3	7.5	7.5	40.0
	37	2	5.0	5.0	45.0
	38	2	5.0	5.0	50.0
	39	3	7.5	7.5	57.5
	40	5	12.5	12.5	70.0
	41	3	7.5	7.5	77.5
	43	2	5.0	5.0	82.5
	45	2	5.0	5.0	87.5
	46	2	5.0	5.0	92.5
	48	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Tingkat pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	6	15.0	15.0	15.0
	S1	23	57.5	57.5	72.5
	S2	1	2.5	2.5	75.0
	SLTA	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Lampiran 4. Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian

Frequencies of Laporan keuangan pemerintah**Statistics**

		Y1	Y2	Y3	Y4
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.68	4.58	4.60	4.63

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	13	32.5	32.5	32.5
	sangat setuju	27	67.5	67.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup setuju	2	5.0	5.0	5.0
	setuju	13	32.5	32.5	37.5
	sangat setuju	25	62.5	62.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	4	10.0	10.0	10.0
	setuju	8	20.0	20.0	30.0
	sangat setuju	28	70.0	70.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	4	10.0	10.0	10.0
	setuju	7	17.5	17.5	27.5
	sangat setuju	29	72.5	72.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Frequencies of Lingkungan pengendalian

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.70	4.80	4.73	4.58

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	12	30.0	30.0	30.0
	sangat setuju	28	70.0	70.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	1	2.5	2.5	2.5
	setuju	6	15.0	15.0	17.5
	sangat setuju	33	82.5	82.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	2	5.0	5.0	5.0
	setuju	7	17.5	17.5	22.5
	sangat setuju	31	77.5	77.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup setuju	1	2.5	2.5	2.5
	setuju	15	37.5	37.5	40.0
	sangat setuju	24	60.0	60.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Frequencies of Penilaian risiko

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.63	4.75	4.65	4.55

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	15	37.5	37.5	37.5
	sangat setuju	25	62.5	62.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	10	25.0	25.0	25.0
	sangat setuju	30	75.0	75.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	14	35.0	35.0	35.0
	sangat setuju	26	65.0	65.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	18	45.0	45.0	45.0
	sangat setuju	22	55.0	55.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Frequencies of Kegiatan pengendalian

Statistics

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.50	4.53	4.43	4.48

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup setuju	4	10.0	10.0	10.0
	setuju	12	30.0	30.0	40.0
	sangat setuju	24	60.0	60.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	2	5.0	5.0	5.0
	setuju	15	37.5	37.5	42.5
	sangat setuju	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	6	15.0	15.0	15.0
	setuju	11	27.5	27.5	42.5
	sangat setuju	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	4	10.0	10.0	10.0
	setuju	13	32.5	32.5	42.5
	sangat setuju	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Frequencies of Informasi & komunikasi

Statistics

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.55	4.65	4.53	4.48

X4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup setuju	1	2.5	2.5	2.5
	setuju	16	40.0	40.0	42.5
	sangat setuju	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	1	2.5	2.5	2.5
	setuju	12	30.0	30.0	32.5
	sangat setuju	27	67.5	67.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	4	10.0	10.0	10.0
	setuju	11	27.5	27.5	37.5
	sangat setuju	25	62.5	62.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	4	10.0	10.0	10.0
	setuju	13	32.5	32.5	42.5
	sangat setuju	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Frequencies of Pemantauan

Statistics

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.73	4.75	4.63	4.83

X5.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	11	27.5	27.5	27.5
	sangat setuju	29	72.5	72.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X5.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	2	5.0	5.0	5.0
	setuju	6	15.0	15.0	20.0
	sangat setuju	32	80.0	80.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X5.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	2	5.0	5.0	5.0
	setuju	11	27.5	27.5	32.5
	sangat setuju	27	67.5	67.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X5.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	7	17.5	17.5	17.5
	sangat setuju	33	82.5	82.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Lampiran 5. Hasil Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.970	24

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1	4.68	.474	40
Y2	4.58	.594	40
Y3	4.60	.672	40
Y4	4.63	.667	40
X1.1	4.70	.464	40
X1.2	4.80	.464	40
X1.3	4.73	.554	40
X1.4	4.58	.549	40
X2.1	4.63	.490	40
X2.2	4.75	.439	40
X2.3	4.65	.483	40
X2.4	4.55	.504	40
X3.1	4.50	.679	40
X3.2	4.53	.599	40
X3.3	4.43	.747	40
X3.4	4.48	.679	40
X4.1	4.55	.652	40
X4.2	4.65	.533	40
X4.3	4.53	.679	40
X4.4	4.48	.679	40
X5.1	4.73	.452	40
X5.2	4.75	.543	40
X5.3	4.63	.586	40
X5.4	4.83	.385	40

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	106.23	103.358	.670	.969
Y2	106.32	100.225	.795	.968
Y3	106.30	99.190	.777	.968
Y4	106.27	98.153	.865	.967
X1.1	106.20	103.549	.665	.969
X1.2	106.10	103.067	.717	.969
X1.3	106.18	101.584	.730	.969
X1.4	106.32	101.456	.748	.968
X2.1	106.27	101.999	.788	.968
X2.2	106.15	103.156	.751	.969
X2.3	106.25	101.679	.834	.968
X2.4	106.35	104.387	.525	.970
X3.1	106.40	98.810	.797	.968
X3.2	106.37	100.087	.801	.968
X3.3	106.48	96.204	.906	.967
X3.4	106.43	98.148	.850	.968
X4.1	106.35	101.567	.734	.969
X4.2	106.25	101.115	.805	.968
X4.3	106.37	98.958	.786	.968
X4.4	106.43	98.302	.838	.968
X5.1	106.18	104.046	.628	.969
X5.2	106.15	102.387	.670	.969
X5.3	106.27	102.102	.642	.969
X5.4	106.07	105.148	.601	.970

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
110.90	110.041	10.490	24

Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regression**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y	40	3.25	5.00	4.6187	.52192	.272
X1	40	3.50	5.00	4.7000	.42442	.180
X2	40	4.00	5.00	4.6438	.39987	.160
X3	40	3.00	5.00	4.4812	.63141	.399
X4	40	3.00	5.00	4.5500	.54065	.292
X5	40	3.50	5.00	4.7313	.42888	.184
Valid N (listwise)	40					

Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4	X5
Pearson Correlation	Y	1.000	.765	.768	.843	.836	.698
	X1	.765	1.000	.780	.840	.800	.523
	X2	.768	.780	1.000	.747	.781	.717
	X3	.843	.840	.747	1.000	.815	.573
	X4	.836	.800	.781	.815	1.000	.626
	X5	.698	.523	.717	.573	.626	1.000
Sig. (1-tailed)	Y		.000	.000	.000	.000	.000
	X1	.000		.000	.000	.000	.000
	X2	.000	.000		.000	.000	.000
	X3	.000	.000	.000		.000	.000
	X4	.000	.000	.000	.000		.000
	X5	.000	.000	.000	.000	.000	
N	Y	40	40	40	40	40	40
	X1	40	40	40	40	40	40
	X2	40	40	40	40	40	40
	X3	40	40	40	40	40	40
	X4	40	40	40	40	40	40
	X5	40	40	40	40	40	40

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X1, X4, X2, X3 ^b		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.812	.785	24208

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.631	5	1.726	29.457	.000 ^b
	Residual	1.992	34	.059		
	Total	10.623	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.062	.558		.111	.912		
	X1	.027	.194	.022	.141	.889	.221	4.529
	X2	.045	.196	.035	.231	.818	.244	4.101
	X3	.344	.127	.416	2.706	.011	.233	4.285
	X4	.297	.144	.308	2.064	.047	.248	4.037
	X5	.280	.134	.230	2.086	.045	.455	2.198

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	X1	X2	X3	X4	X5
1	1	5.979	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.011	23.251	.18	.00	.00	.16	.03	.03
	3	.004	38.748	.26	.07	.01	.04	.02	.50
	4	.003	46.759	.00	.00	.00	.49	.73	.12
	5	.002	57.941	.41	.19	.45	.16	.21	.03
	6	.001	72.915	.15	.74	.54	.15	.00	.32

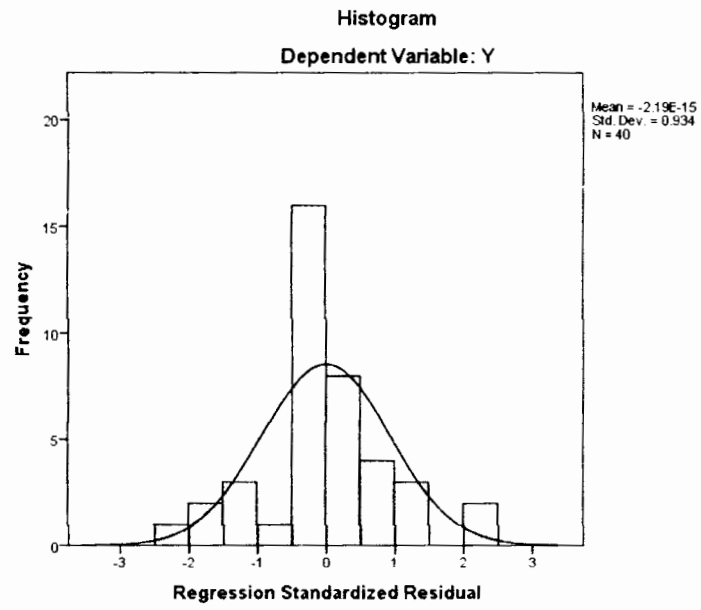
a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

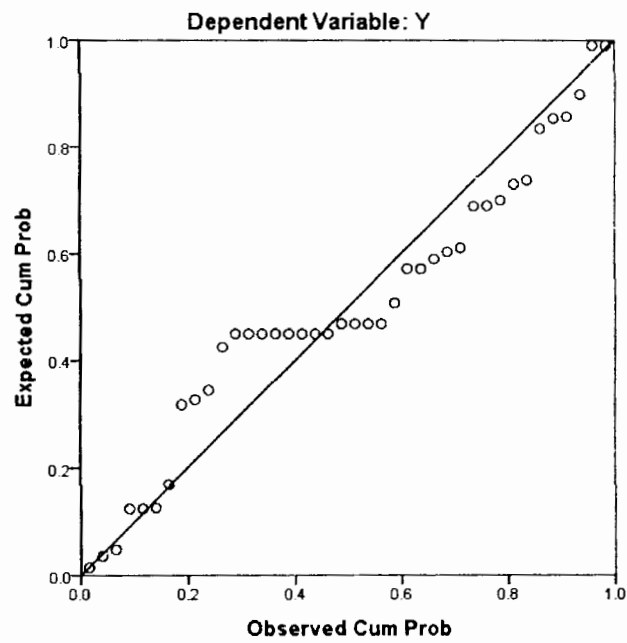
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.5969	5.0305	4.6188	.47043	40
Residual	-.53050	.56654	.00000	.22603	40
Std. Predicted Value	-2.172	.875	.000	1.000	40
Std. Residual	-2.191	2.340	.000	.934	40

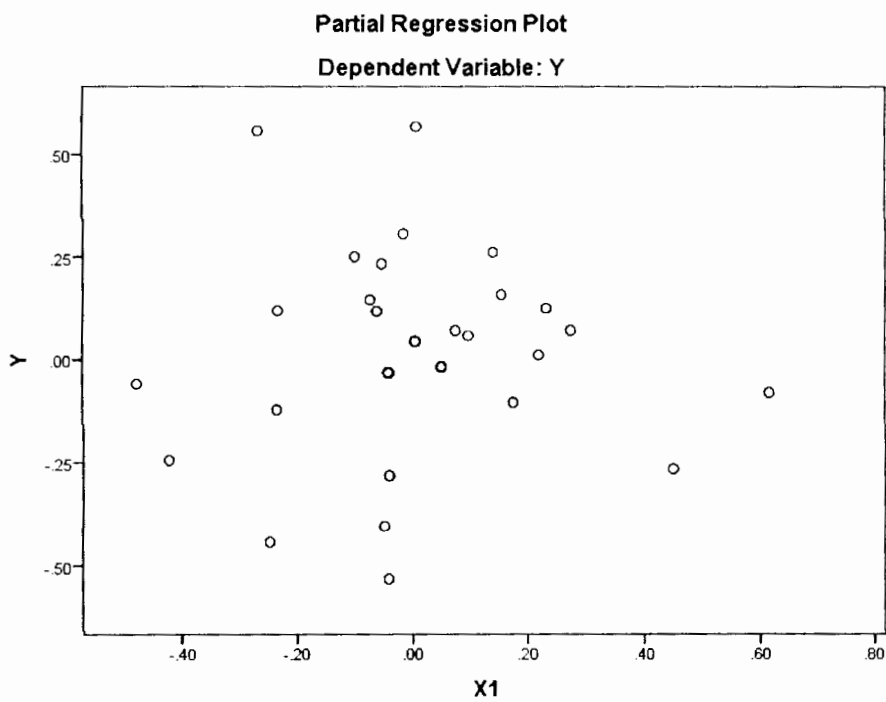
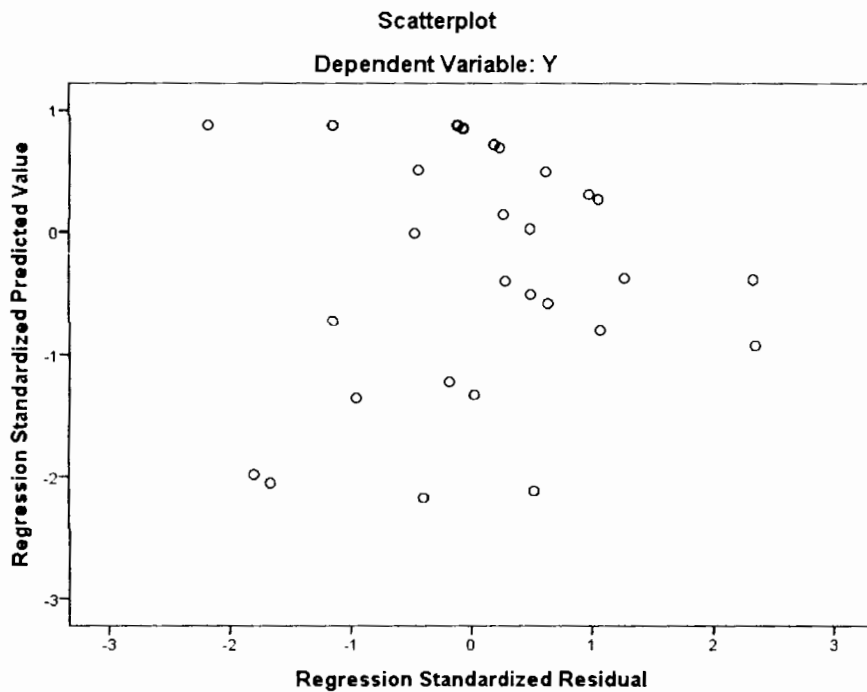
a. Dependent Variable: Y

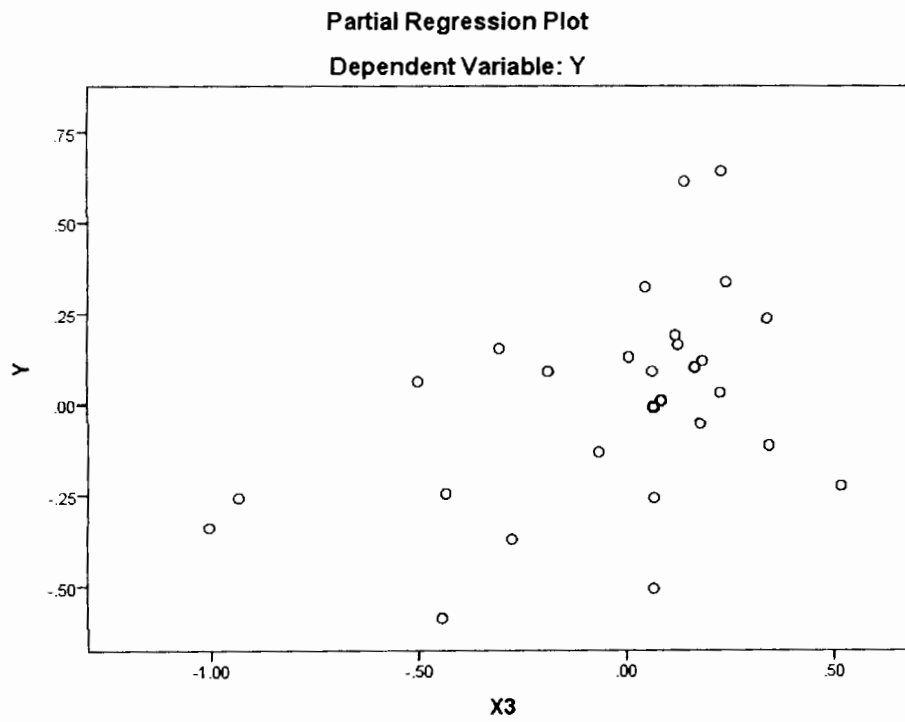
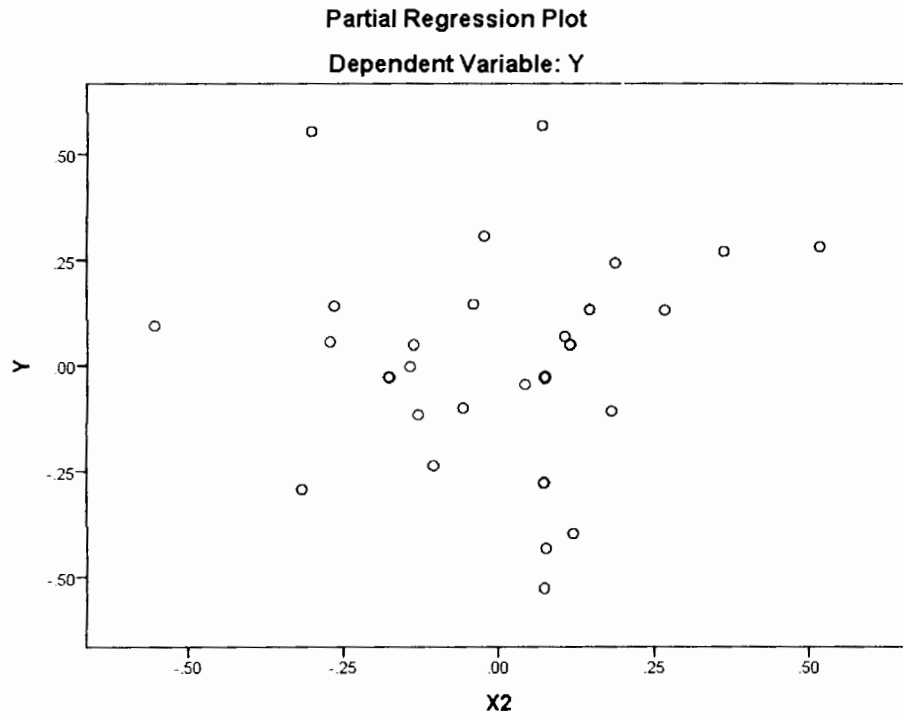
Charts

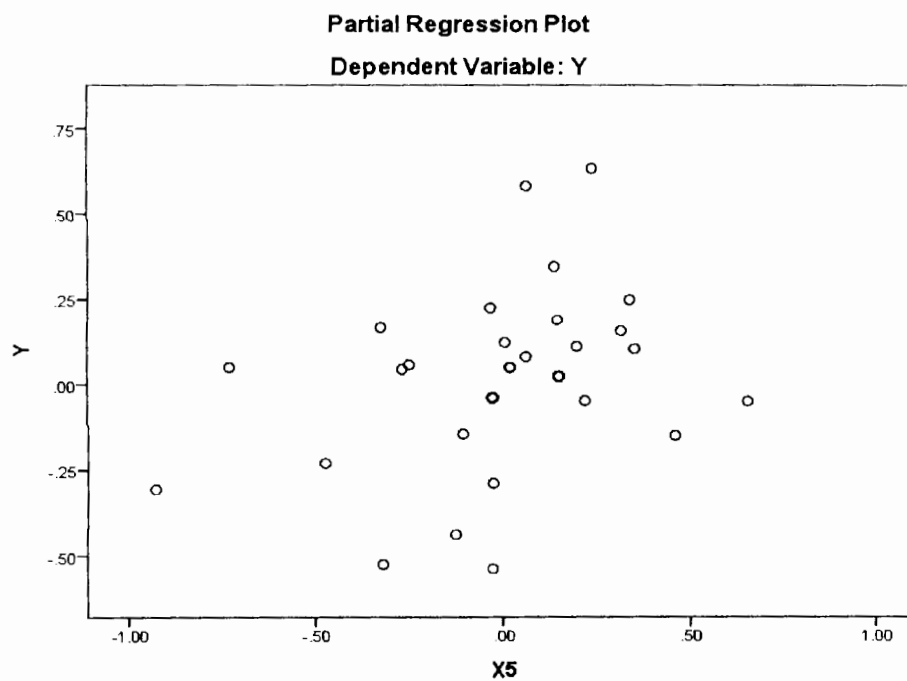
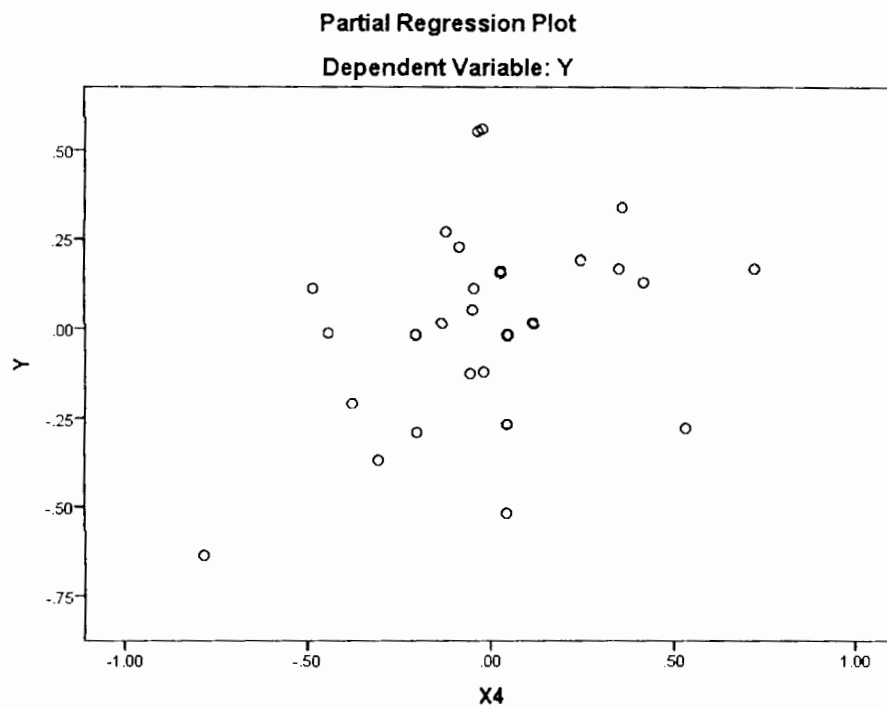


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual











**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Jayapura

Jln. SPG Teruna Bhakti Waena Kotak Pos 204 Abepura Jayapura 99358

Telp 0967 571447. Fax 0967 571090 Email : ut-jayapura@ut.ac.id

UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor : 196A /UN31.52/AK /2015

Lampiran :-

Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data Penelitian /

Kepada

Yth. : Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Muhammad Tahir

Nim : 500030964

Program Studi : S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka

UPBJJ-UT : Jayapura Pokjar Wamena

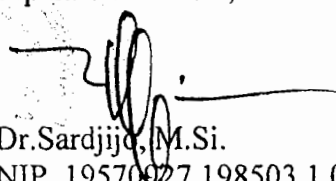
Mahasiswa tersebut pada saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul: "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nduga Propinsi Papua".

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian/mengambil data di instansi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jayapura, 15 Maret 2015

Kepala UPBJJ-UT,


Dr. Sardjija, M.Si.

NIP. 19570027 198503 1 002